



KRISNA-RENJA

BASARNAS

TAHUN 2022

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3, Kemayoran
Jakarta Pusat 10720
www.basarnas.go.id

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. VISI : Terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”
3. MISI : 1. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia
2. Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2022 (RIBU)
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	862.507.857,0
Total		862.507.857,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan		948.150.041,0
01.01	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	57,53	
01.02	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	93,22	
01.03	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	100	
02	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan		907.506.875,0
02.01	Indeks kepuasan masyarakat	84,67	
03	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan		111.520.043,0
03.01	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	26	
03.02	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100	
Total			1.967.176.959,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025
107.BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.059.670.084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.059.670.084,0	4.596.273.434,0	3.812.989.726,0	3.812.989.726,0
107.WA	Program Dukungan Manajemen	907.506.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	907.506.875,0	1.345.587.396,0	1.367.805.079,0	1.367.805.079,0
Total		1.967.176.959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.967.176.959,0	5.941.860.830,0	5.180.794.805,0	5.180.794.805,0

Jakarta, 12 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025
107.BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.059.670.084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.059.670.084,0	4.596.273.434,0	3.812.989.726,0	3.812.989.726,0
107.WA	Program Dukungan Manajemen	907.506.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	907.506.875,0	1.345.587.396,0	1.367.805.079,0	1.367.805.079,0
Total		1.967.176.959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.967.176.959,0	5.941.860.830,0	5.180.794.805,0	5.180.794.805,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA



Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2022 (RIBU)
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	17.450.000,0
05.01	Infrastruktur Pelayanan Dasar	17.450.000,0
Total		17.450.000,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		17.576.026,0
01.01	Penilaian mandiri Merit Sistem dari Kementerian PAN dan RB	280	
02	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		839.043.960,0
02.01	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	90	
02.02	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	
03	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		23.166.652,0
03.01	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup informatif	
04	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan		2.442.000,0
04.01	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100	
05	Meningkatnya kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan		2.963.322,0
05.01	Jumlah koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan	100	
06	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		16.314.915,0
06.01	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB	
06.02	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
06.03	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	60	
07	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)		6.000.000,0
07.01	Level Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Internal Audit Capability Model (IACM)	LEVEL 3	
Total			907.506.875,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Monitoring dan Evaluasi Internal serta Kerja Sama	16.415.077,0
01.01	Persentase Penyelenggaraan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	
01.02	Persentase Penyelenggaraan Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	
01.03	Persentase Penyelenggaraan Kerja Sama	
02	Terwujudnya Layanan Hukum, Organisasi dan Tata Kelola Internal, SDM serta Pendidikan dan Pelatihan Internal	22.881.186,0
02.01	Persentase Penyelenggaraan Layanan Hukum	
02.02	Persentase Penyelenggaraan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	
02.03	Persentase Penyelenggaraan Layanan SDM	
02.04	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	
03	Terwujudnya Layanan Perkantoran, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal, Kehumasan dan Protokoler serta Layanan Umum	787.044.885,0
03.01	Persentase Penyelenggaraan Layanan Perkantoran	
03.02	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	
03.03	Persentase Penyelenggaraan Layanan Umum	
03.04	Persentase Penyelenggaraan Layanan Kehumasan dan Protokoler	
04	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	51.999.075,0
04.01	Persentase Penyelenggaraan Layanan Sarana Internal	
04.02	Persentase Penyelenggaraan Layanan Prasarana Internal	
05	Terwujudnya Layanan Data dan Informasi, Peralatan Teknologi Informasi dan Pemeliharaan serta Layanan Umum	23.166.652,0
05.01	Persentase Penyelenggaraan Layanan Data dan Informasi	
05.02	Persentase Penyelenggaraan Layanan Umum	
05.03	Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	
05.04	Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Peralatan Teknologi Informasi	
05.05	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2022 (RIBU)
06	Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal, Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal serta Layanan Umum	6.000.000,0
06.01	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pengawasan Internal	
06.02	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	
06.03	Persentase Penyelenggaraan Layanan Umum	
Total		907.506.875,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025
3941	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama	16.415.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.415.077,0	22.328.388,0	22.765.802,0	22.765.802,0
3942	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	22.881.186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.881.186,0	56.110.033,0	56.317.343,0	56.317.343,0
3943	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	787.044.885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	787.044.885,0	916.673.192,0	981.037.430,0	981.037.430,0
3944	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.999.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.999.075,0	217.587.556,0	178.770.037,0	178.770.037,0
3945	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	23.166.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.166.652,0	122.331.200,0	117.657.440,0	117.657.440,0
4021	Pengawasan dan Pembinaan Internal	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0	10.557.027,0	11.257.027,0	11.257.027,0
Total		907.506.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	907.506.875,0	1.345.587.396,0	1.367.805.079,0	1.367.805.079,0

Jakarta, 12 November 2021
 SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
 NIP. 196201031991031001

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2022 (RIBU)
06	Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal, Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal serta Layanan Umum	6.000.000,0
06.01	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pengawasan Internal	
06.02	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	
06.03	Persentase Penyelenggaraan Layanan Umum	
Total		907.506.875,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025
3941	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama	16.415.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.415.077,0	22.328.388,0	22.765.802,0	22.765.802,0
3942	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	22.881.186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.881.186,0	56.110.033,0	56.317.343,0	56.317.343,0
3943	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	787.044.885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	787.044.885,0	916.673.192,0	981.037.430,0	981.037.430,0
3944	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.999.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.999.075,0	217.587.556,0	178.770.037,0	178.770.037,0
3945	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	23.166.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.166.652,0	122.331.200,0	117.657.440,0	117.657.440,0
4021	Pengawasan dan Pembinaan Internal	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0	10.557.027,0	11.257.027,0	11.257.027,0
Total		907.506.875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	907.506.875,0	1.345.587.396,0	1.367.805.079,0	1.367.805.079,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA



Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan
03 - Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
3. PROGRAM : Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2022 (RIBU)
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	845.057.857,0
05.01	Infrastruktur Pelayanan Dasar	845.057.857,0
Total		845.057.857,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		69.590.252,0
01.01	Persentase pelaksanaan peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional	100	
01.02	Persentase penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang bina tenaga	100	
02	Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan		41.121.253,0
02.01	Persentase pemenuhan pelaksanaan penyusunan rencana dan standardisasi serta pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	100	
02.02	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang bersertifikat	100	
02.03	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelatihan potensi pencarian dan pertolongan	84	
03	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan		704.517.857,0
03.01	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	55,46	
03.02	Indeks pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	90	
03.03	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas pencarian dan pertolongan	92,44	
04	Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan		132.920.679,0

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
04.01	Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	62.39	
04.02	Indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	95	
04.03	Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	94	
04.04	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)	83	
05	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan		36.526.515,0
05.01	Persentase peningkatan keteraturan sistem dan pola kerja penyelenggaraan Siaga SAR di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	
05.02	Persentase peningkatan pemeliharaan kualitas dan kompetensi peserta dalam penyelenggaraan Latihan SAR	100	
05.03	Persentase peningkatan penyusunan dokumen standardisasi prosedur tetap Siaga dan Latihan SAR	100	
06	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan		74.993.528,0
06.01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	87	
06.02	Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	26	
06.03	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100	
06.04	Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan	100	
06.05	Persentase rencana, pengembangan, evaluasi dan penyusunan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	100	
Total			1.059.670.084,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan, serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Sarana Prasarana SAR	704.517.857,0
01.01	Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	
01.02	Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Sarana SAR	
01.03	Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	
01.04	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	
01.05	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	
01.06	Persentase Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Sarana Prasarana SAR	
01.07	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi di Bidang Sarana Prasarana SAR	
02	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga SAR serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Bina Tenaga SAR	69.590.252,0

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2022 (RIBU)
02.01	Persentase Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Bina Tenaga SAR	
02.02	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga SAR	
03	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Operasi SAR	74.993.528,0
03.01	Persentase Penyelenggaraan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	
03.02	Persentase Penyelenggaraan Operasi SAR	
03.03	Persentase Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Operasi SAR	
03.04	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi di Bidang Operasi SAR	
04	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Peralatan Komunikasi dan Pemeliharaan, serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Sistem Komunikasi SAR	132.920.679,0
04.01	Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	
04.02	Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR	
04.03	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	
04.04	Persentase Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Sistem Komunikasi SAR	
04.05	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi di Bidang Sistem Komunikasi SAR	
05	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Potensi SAR serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Bina Potensi SAR	41.121.253,0
05.01	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Potensi SAR (Prioritas Nasional)	
05.02	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Potensi SAR	
05.03	Persentase Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Bina Potensi SAR	
06	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Siaga, Latihan serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Kesiapsiagaan SAR	36.526.515,0
06.01	Persentase Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Kesiapsiagaan SAR	
06.02	Persentase Penyelenggaraan Siaga SAR	
06.03	Persentase Penyelenggaraan Latihan SAR	
Total		1.059.670.084,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025
3946	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR	704.517.857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704.517.857,0	3.933.278.164,0	3.123.135.929,0	3.123.135.929,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025
3947	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	69.590.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.590.252,0	68.278.031,0	71.003.031,0	71.003.031,0
3948	Pengelolaan Operasi SAR	74.993.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.993.528,0	152.144.521,0	164.691.178,0	164.691.178,0
3949	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	132.920.679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132.920.679,0	246.770.000,0	253.029.000,0	253.029.000,0
3971	Pembinaan Potensi SAR	41.121.253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.121.253,0	71.190.000,0	74.296.040,0	74.296.040,0
3972	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	36.526.515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.526.515,0	124.612.718,0	126.834.548,0	126.834.548,0
Total		1.059.670.084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.059.670.084,0	4.596.273.434,0	3.812.989.726,0	3.812.989.726,0

Jakarta, 12 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2023	2024	2025
3947	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR	69.590.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.590.252,0	68.278.031,0	71.003.031,0	71.003.031,0
3948	Pengelolaan Operasi SAR	74.993.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.993.528,0	152.144.521,0	164.691.178,0	164.691.178,0
3949	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	132.920.679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132.920.679,0	246.770.000,0	253.029.000,0	253.029.000,0
3971	Pembinaan Potensi SAR	41.121.253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.121.253,0	71.190.000,0	74.296.040,0	74.296.040,0
3972	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	36.526.515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.526.515,0	124.612.718,0	126.834.548,0	126.834.548,0
Total		1.059.670.084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.059.670.084,0	4.596.273.434,0	3.812.989.726,0	3.812.989.726,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA



Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM

:

WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM

:

01 - Meningkatkan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
03 - Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
04 - Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatkan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
07 - Meningkatkan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)
4. KEGIATAN

:

3941 - Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

01 - Biro Perencanaan dan KTLN

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan		2.963.322,0
01.01	Persentase tingkat kerjasama di bidang SAR	100	
01.02	Persentase kerjasama luar negeri di bidang SAR yang bisa ditindaklanjuti	100	
01.03	Persentase kerjasama dalam negeri di bidang SAR yang dilaksanakan	100	
02	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan		5.732.262,0
02.01	Persentase satuan kerja yang menyampaikan dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai NSPK / persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	
02.02	Persentase pemantauan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	
02.03	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	95	
03	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga		7.719.493,0
03.01	Persentase pemenuhan target pendanaan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100	
03.02	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
Total			16.415.077,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan</i>										2.963.322,0
01.AEC	Kerja sama			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							2.963.322,0
01.AEC.001	Kerja Sama Dalam Negeri								000 - Bukan Tematik		1.169.000,0
	111 - Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri										1.169.000,0
		Pusat	Pusat								1.169.000,0
01.AEC.002	Kerja Sama Luar Negeri								000 - Bukan Tematik		1.794.322,0
	112 - Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri										1.794.322,0
		Pusat	Pusat								1.794.322,0
02	<i>Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan</i>										5.732.262,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							5.732.262,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								000 - Bukan Tematik		5.732.262,0
	051 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi										5.732.262,0
		Pusat	Pusat								2.752.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								68.492,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								64.388,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								68.540,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								62.252,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								59.252,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								59.636,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								56.300,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								51.968,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								57.266,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								51.038,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								54.374,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								84.884,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								58.868,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								48.060,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								61.112,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								54.632,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								54.632,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								55.148,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								57.584,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								55.148,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								55.148,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								61.112,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								60.920,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								72.026,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								72.026,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								58.226,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								59.444,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								59.510,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								64.322,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								68.540,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								72.152,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								72.218,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								64.514,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								66.632,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran										6.315.493,0
		Pusat	Pusat								2.183.321,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								94.656,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								89.964,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								100.500,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								86.336,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								82.336,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								82.848,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								78.400,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								72.624,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								79.688,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								71.384,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								77.184,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								116.512,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								81.824,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								63.520,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								84.816,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								76.176,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								76.176,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								76.864,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								80.112,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								76.864,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								76.864,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								84.816,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								84.560,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								99.368,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								115.368,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								112.032,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								145.312,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								145.312,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								145.120,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								118.872,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								118.616,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura								124.264,0
Total											16.415.077,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan				2.963.322,0				3.903.200,0	4.233.200,0	4.233.200,0
01.AEC	Kerja sama	7	Kesepakatan/Dokumen/Kegiatan		2.963.322,0				3.903.200,0	4.233.200,0	4.233.200,0
01.AEC.001	Kerja Sama Dalam Negeri	4	Kesepakatan		1.169.000,0	4	4	4	2.390.000,0	2.610.000,0	2.610.000,0
01.AEC.001.111	Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri	1,0	Kesepakatan	1.169.000,0	1.169.000,0	1,0	1,0	1,0	2.390.000,0	2.610.000,0	2.610.000,0
01.AEC.002	Kerja Sama Luar Negeri	3	Kesepakatan		1.794.322,0	2	2	2	1.513.200,0	1.623.200,0	1.623.200,0
01.AEC.002.112	Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri	1,0	Kesepakatan	1.794.322,0	1.794.322,0	1,0	1,0	1,0	1.513.200,0	1.623.200,0	1.623.200,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
02	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan				5.732.262,0				7.344.868,0	7.680.302,0	7.680.302,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	97	Dokumen/Layanan/Laporan		5.732.262,0				7.344.868,0	7.680.302,0	7.680.302,0
02.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	49	Dokumen		5.732.262,0	50	50	50	7.344.868,0	7.680.302,0	7.680.302,0
02.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	44,0	Dokumen	130.278,7	5.732.262,0	44,0	44,0	52,0	7.344.868,0	7.680.302,0	7.680.302,0
03	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga				7.719.493,0				11.080.320,0	10.852.300,0	10.852.300,0
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	97	Dokumen/Layanan/Laporan		7.719.493,0				11.080.320,0	10.852.300,0	10.852.300,0
03.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	48	Dokumen		7.719.493,0	50	50	50	11.080.320,0	10.852.300,0	10.852.300,0
03.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Kerja	2,0	Dokumen	702.000,0	1.404.000,0	3,0	3,0	3,0	2.665.000,0	2.620.000,0	2.620.000,0
03.EBD.952.052	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	47,0	Dokumen	134.372,2	6.315.493,0	47,0	47,0	47,0	8.415.320,0	8.232.300,0	8.232.300,0
Total					16.415.077,0	-	-	-	22.328.388,0	22.765.802,0	22.765.802,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Utama	5.732.262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.732.262,0
03	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga		7.719.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.719.493,0
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7.719.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.719.493,0
03.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		7.719.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.719.493,0
03.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Kerja	Utama	1.404.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.404.000,0
03.EBD.952.052	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Utama	6.315.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.315.493,0
Total			16.415.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.415.077,0

Jakarta, 12 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.EBD.953.051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Utama	5.732.262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.732.262,0
03	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga		7.719.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.719.493,0
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7.719.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.719.493,0
03.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		7.719.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.719.493,0
03.EBD.952.051	Penyusunan Rencana Kerja	Utama	1.404.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.404.000,0
03.EBD.952.052	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Utama	6.315.493,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.315.493,0
Total			16.415.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.415.077,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA



Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM

:

WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM

:

01 - Meningkatkan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
03 - Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
04 - Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatkan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
07 - Meningkatkan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)
4. KEGIATAN

:

3942 - Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

02 - Biro Hukum dan Kepegawaian

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai		17.576.026,0
01.01	Persentase pemenuhan sesuai rencana kebutuhan pegawai	70	
01.02	Persentase pemenuhan pengadaan pegawai sesuai formasi	100	
01.03	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	
01.04	Persentase promosi dan mutasi sesuai standar kompetensi	90	
01.05	Persentase pegawai yang berpredikat baik dalam penilaian kinerja pegawai	85	
01.06	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	8	
01.07	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian (cuti, tunjangan, JFT)	90	
01.08	Persentase kepuasan pegawai terhadap Aplikasi Sistem Informasi Pegawai	90	
02	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas		2.442.000,0
02.01	Persentase peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	100	
02.02	Persentase advokasi hukum, telaah hukum dan evaluasi peraturan yang diselesaikan	80	
02.03	Persentase informasi hukum yang disebarluaskan	100	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
03	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien		2.863.160,0
03.01	Nilai hasil PMPRB	81	
03.02	Persentase bahan penataan organisasi	60	
03.03	Persentase dokumen ketatalaksanaan yang dihasilkan	80	
03.04	Persentase SOP yang disahkan	90	
Total			22.881.186,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai</i>										17.576.026,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							17.576.026,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM								000 - Bukan Tematik		6.862.083,0
	054 - Pengelolaan Kepegawaian										400.000,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								100.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								0,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								0,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								0,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								0,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	121 - Pengelolaan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai										2.959.175,0
		Pusat	Pusat								2.959.175,0
	122 - Pengelolaan Mutasi dan Disiplin Pegawai										1.414.000,0
		Pusat	Pusat								1.414.000,0
	123 - Pengelolaan Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian										2.088.908,0
		Pusat	Pusat								2.088.908,0
01.EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan								000 - Bukan Tematik		1.237.943,0
	052 - Pelaksanaan Pendidikan										1.237.943,0
		Pusat	Pusat								1.237.943,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								000 - Bukan Tematik		9.476.000,0
	052 - Pengembangan Kompetensi										9.476.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								9.476.000,0
02	<i>Terwujudnya produk hukum yang berkualitas</i>										2.442.000,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							2.442.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							1.278.200,0
03.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								000 - Bukan Tematik		1.278.200,0
	051 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										1.278.200,0
		Pusat	Pusat								353.200,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								0,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								0,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								50.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								150.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								150.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								150.000,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								225.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								100.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0
Total											22.881.186,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai				17.576.026,0				39.466.306,0	40.749.632,0	40.749.632,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	59	Orang/Layanan		17.576.026,0				39.466.306,0	40.749.632,0	40.749.632,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	23	Orang		6.862.083,0	68	68	68	33.686.154,0	34.945.460,0	34.945.460,0
01.EBC.954.054	Pengelolaan Kepegawaian	15,0	Orang	26.666,7	400.000,0	44,0	43,0	44,0	4.400.000,0	4.400.000,0	4.400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.EBC.954.121	Pengelolaan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	5,0	Orang	591.835,0	2.959.175,0	10,0	10,0	10,0	24.967.623,0	26.026.004,0	26.026.004,0
01.EBC.954.122	Pengelolaan Mutasi dan Disiplin Pegawai	5,0	Orang	282.800,0	1.414.000,0	6,0	6,0	6,0	1.936.415,0	2.033.235,0	2.033.235,0
01.EBC.954.123	Pengelolaan Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian	8,0	Orang	261.113,5	2.088.908,0	8,0	8,0	8,0	2.382.116,0	2.486.221,0	2.486.221,0
01.EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	25	Orang		1.237.943,0	4	4	4	2.080.152,0	2.104.172,0	2.104.172,0
01.EBC.968.052	Pelaksanaan Pendidikan	25,0	Orang	49.517,7	1.237.943,0	4,0	4,0	4,0	2.080.152,0	2.104.172,0	2.104.172,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	11	Orang		9.476.000,0	5	5	5	3.700.000,0	3.700.000,0	3.700.000,0
01.EBC.996.052	Pengembangan Kompetensi	9,0	Orang	1.052.888,9	9.476.000,0	5,0	5,0	5,0	3.700.000,0	3.700.000,0	3.700.000,0
02	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas				2.442.000,0				6.568.800,0	4.965.680,0	4.965.680,0
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15	Layanan/Laporan/Dokumen		2.442.000,0				6.568.800,0	4.965.680,0	4.965.680,0
02.EBA.957	Layanan Hukum	8	Layanan		2.252.500,0	9	8	8	5.298.300,0	3.568.130,0	3.568.130,0
02.EBA.957.121	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	7,0	Layanan	306.214,3	2.143.500,0	8,0	7,0	7,0	5.032.100,0	3.275.310,0	3.275.310,0
02.EBA.957.122	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1,0	Layanan	109.000,0	109.000,0	1,0	1,0	1,0	266.200,0	292.820,0	292.820,0
02.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		189.500,0	3	3	3	1.270.500,0	1.397.550,0	1.397.550,0
02.EBA.969.052	Pelaksanaan Bantuan Hukum	1,0	Layanan	189.500,0	189.500,0	3,0	3,0	3,0	1.270.500,0	1.397.550,0	1.397.550,0
03	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien				2.863.160,0				10.074.927,0	10.602.031,0	10.602.031,0
03.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15	Layanan/Laporan/Dokumen		1.584.960,0				4.806.527,0	5.579.951,0	5.579.951,0
03.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6	Layanan		1.584.960,0	12	12	12	4.806.527,0	5.579.951,0	5.579.951,0
03.EBA.960.051	Pengelolaan Kelembagaan	2,0	Layanan	404.480,0	808.960,0	5,0	5,0	5,0	2.245.475,0	2.506.688,0	2.506.688,0
03.EBA.960.052	Tata Laksana Organisasi	4,0	Layanan	194.000,0	776.000,0	7,0	7,0	7,0	2.561.052,0	3.073.263,0	3.073.263,0
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8	Dokumen/Layanan/Laporan		1.278.200,0				5.268.400,0	5.022.080,0	5.022.080,0
03.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	8	Dokumen		1.278.200,0	46	45	45	5.268.400,0	5.022.080,0	5.022.080,0
03.EBD.961.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	8,0	Dokumen	159.775,0	1.278.200,0	46,0	45,0	45,0	5.268.400,0	5.022.080,0	5.022.080,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.EBA.960.052	Tata Laksana Organisasi	Utama	776.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776.000,0
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1.278.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278.200,0
03.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1.278.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278.200,0
03.EBD.961.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Utama	1.278.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278.200,0
Total			22.881.186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.881.186,0

Jakarta, 12 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.EBA.960.052	Tata Laksana Organisasi	Utama	776.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776.000,0
03.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1.278.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278.200,0
03.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1.278.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278.200,0
03.EBD.961.051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Utama	1.278.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278.200,0
Total			22.881.186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.881.186,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA



Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
03 - Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
04 - Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatnya kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
07 - Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)
4. KEGIATAN : 3943 - Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 03 - Biro Umum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel		749.753.653,0
01.01	Persentase kepuasan pelayanan petugas keamanan, kebersihan, pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan di Poliklinik	90	
01.02	Persentase pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara	90	
01.03	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	90	
01.04	Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kerumahtanggaan	100	
01.05	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100	
02	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel		8.257.880,0
02.01	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan APIP	70	
02.02	Persentase usulan revisi POK yang ditindaklanjuti	100	
02.03	Persentase penyerapan DIPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	90	
02.04	Persentase ketepatan penyajian laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tepat waktu dan sesuai SAP	90	
02.05	Persentase dokumen LPJK yang telah diverifikasi	85	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								223.647.993,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								3.601.212,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								8.467.417,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								3.425.295,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								11.001.539,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								7.658.748,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								11.366.752,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								10.360.959,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								9.018.491,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								3.923.564,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								2.435.171,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								7.469.416,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								8.167.466,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								5.654.200,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								6.682.390,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								7.479.578,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								10.039.441,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								2.909.496,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								6.545.034,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								6.901.252,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								9.145.350,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								7.779.576,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								10.194.331,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								10.484.700,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								9.551.462,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								11.553.694,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								9.590.265,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								4.995.060,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								6.863.630,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								8.288.974,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								7.958.723,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								7.874.560,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								7.216.283,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								5.605.607,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								4.795.867,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								4.163.731,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								7.730.936,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								5.980.081,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								5.444.343,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								3.695.256,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								9.784.223,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								4.634.561,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								7.195.913,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								2.002.589,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								2.338.244,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										216.780.280,0
		Pusat	Pusat								50.004.888,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								7.207.378,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								3.465.159,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.715.954,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								5.391.835,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								2.347.294,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								5.904.621,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								4.938.865,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								4.676.817,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								2.457.556,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								1.920.062,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								3.249.917,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								3.072.725,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								2.542.366,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								4.233.321,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								2.834.025,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								4.197.765,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								2.825.319,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								3.961.015,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								3.521.020,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								4.911.689,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								3.551.411,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								5.564.723,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								4.760.764,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								4.560.494,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								4.617.831,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								3.876.869,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								2.340.312,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.840.819,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								5.080.674,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								4.955.407,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								4.469.967,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								4.670.079,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								2.419.041,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								3.441.636,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Banten	Kab. Serang								2.473.933,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								6.053.260,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								3.137.778,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								3.726.789,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								2.386.613,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								4.023.479,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								3.536.315,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								4.620.208,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								1.776.662,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								2.515.625,0
02	<i>Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel</i>										8.257.880,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							8.257.880,0
02.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								000 - Bukan Tematik		8.257.880,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan										4.538.880,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								108.738,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								97.722,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								103.950,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								94.518,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								90.018,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								90.594,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								85.590,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								79.092,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								87.039,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								77.697,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								82.701,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								128.466,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								90.306,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								90.405,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								97.623,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								103.950,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								109.368,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								109.467,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								102.771,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								101.088,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								106.866,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								107.253,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								127.179,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								123.426,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								160.866,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								250.000,0
	133 - Penyelenggaraan Kehumasan										2.640.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								60.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								60.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								60.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								60.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								60.000,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								60.000,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								60.000,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								60.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								60.000,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								60.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								60.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								60.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								60.000,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								60.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								60.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								60.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								60.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								60.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								60.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								60.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								60.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								60.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								60.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								60.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								60.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								60.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								60.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								60.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								60.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								60.000,0
03.EBA.959	Layanan Protokoler								000 - Bukan Tematik		6.475.000,0
	052 - Pelaksanaan Keprotokoleran										6.475.000,0
		Pusat	Pusat								2.400.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								75.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								150.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								75.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								75.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								75.000,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								75.000,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								75.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								75.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								100.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								75.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								75.000,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								75.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								75.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								75.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								75.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								75.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								150.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								75.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								75.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								75.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								75.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								75.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								75.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								100.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								75.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								75.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								75.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								75.000,0
04	<i>Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal</i>										11.418.352,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							8.581.352,0
04.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		8.581.352,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	055 - Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan										7.866.480,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								181.008,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								164.592,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								181.200,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								156.048,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								144.048,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								145.584,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								132.240,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								127.632,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								136.104,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								111.192,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								124.536,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								246.576,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								332.976,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								332.400,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								269.832,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								253.656,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								252.888,0
	131 - Layanan Pengadaan Barang dan Jasa										664.872,0
		Pusat	Pusat								664.872,0
	132 - Layanan Pengadaan Secara Elektronik										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	133 - Pengelolaan Urusan Dalam										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
04.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							2.837.000,0
04.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								000 - Bukan Tematik		2.837.000,0
	131 - Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan										1.077.961,0
		Pusat	Pusat								1.077.961,0
	132 - Pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan										824.039,0
		Pusat	Pusat								824.039,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	133 - Pengelolaan Persuratan/ Kearsipan dan Dokumen Lainnya										935.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								15.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								15.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								15.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								15.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								15.000,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								15.000,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								15.000,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								15.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								15.000,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								15.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								15.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								15.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								15.000,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								15.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								15.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								15.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								15.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								15.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								15.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								15.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								15.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								15.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								15.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								15.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								15.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								15.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								15.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								15.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								15.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								15.000,0
Total											787.044.885,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel				749.753.653,0				864.169.617,0	928.414.977,0	928.414.977,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	244	Layanan/Laporan/Dokumen		749.753.653,0				864.169.617,0	928.414.977,0	928.414.977,0
01.EBA.956	Layanan BMN	5	Layanan		1.350.000,0	5	5	5	1.894.479,0	1.968.372,0	1.968.372,0
01.EBA.956.131	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)	5,0	Layanan	270.000,0	1.350.000,0	5,0	5,0	5,0	1.894.479,0	1.968.372,0	1.968.372,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	90	Layanan		748.403.653,0	90	90	90	862.275.138,0	926.446.605,0	926.446.605,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	45,0	Layanan	11.813.852,7	531.623.373,0	45,0	45,0	45,0	658.153.260,0	717.801.016,0	717.801.016,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	45,0	Layanan	4.817.339,6	216.780.280,0	45,0	45,0	45,0	204.121.878,0	208.645.589,0	208.645.589,0
02	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel				8.257.880,0				11.269.354,0	11.463.164,0	11.463.164,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	134	Dokumen/Layanan/Laporan		8.257.880,0				11.269.354,0	11.463.164,0	11.463.164,0
02.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	67	Dokumen		8.257.880,0	56	56	56	11.269.354,0	11.463.164,0	11.463.164,0
02.EBD.955.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	44,0	Dokumen	103.156,4	4.538.880,0	44,0	44,0	44,0	6.770.216,0	6.739.068,0	6.739.068,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
02.EBD.955.131	Pengelolaan Anggaran	7,0	Dokumen	164.285,7	1.150.000,0	3,0	3,0	3,0	1.666.349,0	1.749.666,0	1.749.666,0
02.EBD.955.132	Pengelolaan Perbendaharaan	7,0	Dokumen	172.857,1	1.210.000,0	4,0	4,0	4,0	1.471.940,0	1.545.537,0	1.545.537,0
02.EBD.955.133	Pengelolaan Akuntansi Keuangan	9,0	Dokumen	151.000,0	1.359.000,0	5,0	5,0	5,0	1.360.849,0	1.428.893,0	1.428.893,0
03	Meningkatnya kualitas layanan publikasi informasi pencarian dan pertolongan serta keprotokoleran				17.615.000,0				18.212.321,0	17.918.820,0	17.918.820,0
03.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	244	Layanan/Laporan/Dokumen		17.615.000,0				18.212.321,0	17.918.820,0	17.918.820,0
03.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	53	Layanan		11.140.000,0	51	51	51	11.000.641,0	10.541.000,0	10.541.000,0
03.EBA.958.131	Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi	8,0	Layanan	1.031.250,0	8.250.000,0	6,0	6,0	6,0	6.874.641,0	6.350.000,0	6.350.000,0
03.EBA.958.132	Pengelolaan Hubungan Antar Media	1,0	Layanan	250.000,0	250.000,0	2,0	2,0	2,0	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0
03.EBA.958.133	Penyelenggaraan Kehumasan	44,0	Layanan	60.000,0	2.640.000,0	43,0	43,0	43,0	2.876.000,0	2.941.000,0	2.941.000,0
03.EBA.959	Layanan Protokoler	49	Layanan		6.475.000,0	49	49	49	7.211.680,0	7.377.820,0	7.377.820,0
03.EBA.959.052	Pelaksanaan Keprotokoleran	49,0	Layanan	132.142,9	6.475.000,0	49,0	49,0	49,0	7.211.680,0	7.377.820,0	7.377.820,0
04	Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal				11.418.352,0				23.021.900,0	23.240.469,0	23.240.469,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	244	Layanan/Laporan/Dokumen		8.581.352,0				20.337.684,0	20.422.043,0	20.422.043,0
04.EBA.962	Layanan Umum	47	Layanan		8.581.352,0	51	51	51	20.337.684,0	20.422.043,0	20.422.043,0
04.EBA.962.055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	44,0	Layanan	178.783,6	7.866.480,0	44,0	44,0	44,0	19.061.641,0	19.142.198,0	19.142.198,0
04.EBA.962.131	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,0	Layanan	332.436,0	664.872,0	3,0	3,0	3,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
04.EBA.962.132	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0,0	Layanan	NaN	0,0	3,0	3,0	3,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
04.EBA.962.133	Pengelolaan Urusan Dalam	1,0	Layanan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	76.043,0	79.845,0	79.845,0
04.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	134	Dokumen/Layanan/Laporan		2.837.000,0				2.684.216,0	2.818.426,0	2.818.426,0
04.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	67	Dokumen		2.837.000,0	8	8	8	2.684.216,0	2.818.426,0	2.818.426,0
04.EBD.974.131	Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan	5,0	Dokumen	215.592,2	1.077.961,0	7,0	7,0	7,0	2.198.198,0	2.308.107,0	2.308.107,0
04.EBD.974.132	Pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan	2,0	Dokumen	412.019,5	824.039,0	1,0	1,0	1,0	486.018,0	510.319,0	510.319,0
04.EBD.974.133	Pengelolaan Persuratan/ Kearsipan dan Dokumen Lainnya	59,0	Dokumen	15.847,5	935.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
Total					787.044.885,0	-	-	-	916.673.192,0	981.037.430,0	981.037.430,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel		749.753.653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749.753.653,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		749.753.653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749.753.653,0
01.EBA.956	Layanan BMN		1.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350.000,0
01.EBA.956.131	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)	Utama	1.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350.000,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		748.403.653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748.403.653,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	531.623.373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531.623.373,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	216.780.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216.780.280,0
02	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel		8.257.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.257.880,0
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		8.257.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.257.880,0
02.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		8.257.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.257.880,0
02.EBD.955.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Utama	4.538.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.538.880,0
02.EBD.955.131	Pengelolaan Anggaran	Utama	1.150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150.000,0
02.EBD.955.132	Pengelolaan Perbendaharaan	Utama	1.210.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.210.000,0
02.EBD.955.133	Pengelolaan Akuntansi Keuangan	Utama	1.359.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.359.000,0
03	Meningkatnya kualitas layanan publikasi informasi pencarian dan pertolongan serta keprotokoleran		17.615.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.615.000,0
03.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		17.615.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.615.000,0
03.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat		11.140.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.140.000,0
03.EBA.958.131	Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi	Utama	8.250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.250.000,0
03.EBA.958.132	Pengelolaan Hubungan Antar Media	Utama	250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
03.EBA.958.133	Penyelenggaraan Kehumasan	Utama	2.640.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.640.000,0
03.EBA.959	Layanan Protokoler		6.475.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.475.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.EBA.959.052	Pelaksanaan Keprotokoleran	Utama	6.475.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.475.000,0
04	Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal		11.418.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.418.352,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		8.581.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.581.352,0
04.EBA.962	Layanan Umum		8.581.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.581.352,0
04.EBA.962.055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Utama	7.866.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.866.480,0
04.EBA.962.131	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Utama	664.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664.872,0
04.EBA.962.132	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.EBA.962.133	Pengelolaan Urusan Dalam	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
04.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.837.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.837.000,0
04.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		2.837.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.837.000,0
04.EBD.974.131	Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan	Utama	1.077.961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.077.961,0
04.EBD.974.132	Pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan	Utama	824.039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824.039,0
04.EBD.974.133	Pengelolaan Persuratan/ Kearsipan dan Dokumen Lainnya	Utama	935.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935.000,0
Total			787.044.885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	787.044.885,0

Jakarta, 12 November 2021
 SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
 NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.EBA.959.052	Pelaksanaan Keptokoleran	Utama	6.475.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.475.000,0
04	Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal		11.418.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.418.352,0
04.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		8.581.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.581.352,0
04.EBA.962	Layanan Umum		8.581.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.581.352,0
04.EBA.962.055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Utama	7.866.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.866.480,0
04.EBA.962.131	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Utama	664.872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664.872,0
04.EBA.962.132	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.EBA.962.133	Pengelolaan Urusan Dalam	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
04.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2.837.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.837.000,0
04.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		2.837.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.837.000,0
04.EBD.974.131	Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan	Utama	1.077.961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.077.961,0
04.EBD.974.132	Pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan	Utama	824.039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824.039,0
04.EBD.974.133	Pengelolaan Persuratan/ Kearsipan dan Dokumen Lainnya	Utama	935.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935.000,0
Total			787.044.885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	787.044.885,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM

:

WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM

:

01 - Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
03 - Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
04 - Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatnya kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
07 - Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)
4. KEGIATAN

:

3944 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

03 - Biro Umum

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		51.999.075,0
01.01	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	90	
Total			51.999.075,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur										51.999.075,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							51.999.075,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		24.537.714,0
	051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor										126.188,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								61.750,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								64.438,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								0,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								0,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								0,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								0,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								0,0
	052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										5.073.150,0
		Pusat	Pusat								1.550.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								30.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								121.750,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								73.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								220.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								50.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								205.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								155.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								90.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								130.000,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								50.000,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								18.000,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								175.400,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								155.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								87.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								185.000,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								77.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								170.000,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								25.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								60.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								232.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								60.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								67.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								122.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								115.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								60.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								135.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								120.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								135.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								70.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								30.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								30.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								169.500,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								0,0
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran										19.338.376,0
		Pusat	Pusat								3.553.060,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								227.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								112.250,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								527.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								127.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								377.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								256.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								594.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								290.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								18.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								550.000,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								712.000,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								449.500,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								57.000,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								562.213,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								577.500,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								781.058,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								444.500,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								250.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								407.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								626.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								520.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								227.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								369.787,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								200.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								353.008,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								361.500,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								1.950.000,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal								000 - Bukan Tematik		27.461.361,0
	054 - Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan										27.461.361,0
		Pusat	Pusat								4.611.966,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								566.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								200.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								200.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								220.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								0,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								277.900,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								800.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								0,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								950.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								347.320,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								400.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								1.268.600,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								2.507.625,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								200.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								200.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								500.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								1.079.100,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								401.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								300.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								1.746.048,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								679.754,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								477.820,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								1.250.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								1.500.000,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								720.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								300.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								2.000.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								1.465.728,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								500.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								1.292.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura								0,0
	055 - Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								0,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								0,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								0,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								0,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura								0,0
Total											51.999.075,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				51.999.075,0				217.587.556,0	178.770.037,0	178.770.037,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	688	Unit/m2/Paket		51.999.075,0				217.587.556,0	178.770.037,0	178.770.037,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	644	Unit		24.537.714,0	608	506	505	43.920.273,0	35.131.698,0	35.131.698,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	4,0	Unit	31.547,0	126.188,0	31,0	26,0	26,0	3.096.397,0	6.398.443,0	6.398.443,0
01.EBB.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	284,0	Unit	17.863,2	5.073.150,0	209,0	180,0	180,0	8.327.876,0	7.031.255,0	7.031.255,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	416,0	Unit	46.486,5	19.338.376,0	358,0	299,0	299,0	32.496.000,0	21.702.000,0	21.702.000,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	44	Unit		27.461.361,0	130	113	113	173.667.283,0	143.638.339,0	143.638.339,0
01.EBB.971.054	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	40,0	Unit	686.534,0	27.461.361,0	126,0	109,0	110,0	147.067.283,0	131.138.339,0	131.138.339,0
01.EBB.971.055	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	0,0	Unit	NaN	0,0	4,0	3,0	3,0	26.600.000,0	12.500.000,0	12.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
Total					51.999.075,0	-	-	-	217.587.556,0	178.770.037,0	178.770.037,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		51.999.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.999.075,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		51.999.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.999.075,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		24.537.714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.537.714,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Utama	126.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126.188,0
01.EBB.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Utama	5.073.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.073.150,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Utama	19.338.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.338.376,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		27.461.361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.461.361,0
01.EBB.971.054	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	Utama	27.461.361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.461.361,0
01.EBB.971.055	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			51.999.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.999.075,0

Jakarta, 12 November 2021
 SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
 NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
Total					51.999.075,0	-	-	-	217.587.556,0	178.770.037,0	178.770.037,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		51.999.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.999.075,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		51.999.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.999.075,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		24.537.714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.537.714,0
01.EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Utama	126.188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126.188,0
01.EBB.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Utama	5.073.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.073.150,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Utama	19.338.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.338.376,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		27.461.361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.461.361,0
01.EBB.971.054	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	Utama	27.461.361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.461.361,0
01.EBB.971.055	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			51.999.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.999.075,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM

:

WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM

:

01 - Meningkatkan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
03 - Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
04 - Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatkan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
07 - Meningkatkan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)
4. KEGIATAN

:

3945 - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

04 - Pusat Data dan Informasi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Tersedianya data dan informasi yang akurat		1.800.000,0
01.01	Persentase ketersediaan data pada unit dan satuan kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikirim tepat waktu	80	
01.02	Persentase kepuasan masyarakat melalui polling atas data dan informasi yang terdapat pada website Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	75	
01.03	Persentase penyajian data statistik pencarian dan pertolongan	70	
01.04	Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik	
01.05	Persentase paket pekerjaan yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	80	
01.06	Persentase pelaksanaan ketatausahaan	85	
01.07	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi	70	
01.08	Persentase terpenuhinya SDM yang kompeten mengoperasikan aplikasi sistem informasi	80	
01.09	Persentase sistem informasi yang telah dioperasikan sesuai SOP	80	
02	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi pencarian dan pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan		3.916.652,0
02.01	Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi	75	
02.02	Persentase pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi	83	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
03	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan		17.450.000,0
03.01	Persentase pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi	98	
03.02	Persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	98	
Total			23.166.652,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Tersedianya data dan informasi yang akurat</i>										1.800.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							1.800.000,0
01.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	141 - Pengelolaan Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi										300.000,0
		Pusat	Pusat								300.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								000 - Bukan Tematik		1.500.000,0
	141 - Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi										550.000,0
		Pusat	Pusat								550.000,0
	142 - Pengelolaan Infrastruktur Sistem Informasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	143 - Pengelolaan Data dan Informasi										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	144 - Pengelolaan Penyajian Informasi										750.000,0
		Pusat	Pusat								750.000,0
02	<i>Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi pencarian dan pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan</i>										3.916.652,0
02.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							3.916.652,0
02.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi								000 - Bukan Tematik		3.916.652,0
	141 - Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi										3.916.652,0
		Pusat	Pusat								3.916.652,0
02.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							0,0
02.RAN.001	Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								26.520,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								43.560,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								52.080,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								35.040,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								35.040,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								18.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								35.040,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								35.040,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								35.040,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								26.520,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								35.040,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								36.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								30.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								30.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								30.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								26.520,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								24.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								18.000,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								26.520,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								26.520,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								30.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								26.520,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								35.040,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								24.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								18.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								24.000,0
Total											23.166.652,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Tersedianya data dan informasi yang akurat				1.800.000,0				3.448.800,0	3.958.560,0	3.958.560,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9	Layanan/Laporan/Dokumen		1.800.000,0				3.448.800,0	3.958.560,0	3.958.560,0
01.EBA.962	Layanan Umum	2	Layanan		300.000,0	1	1	1	150.000,0	150.000,0	150.000,0
01.EBA.962.141	Pengelolaan Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi	2,0	Layanan	150.000,0	300.000,0	1,0	1,0	1,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	7	Layanan		1.500.000,0	9	9	9	3.298.800,0	3.808.560,0	3.808.560,0
01.EBA.963.141	Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi	2,0	Layanan	275.000,0	550.000,0	3,0	3,0	3,0	1.354.800,0	1.475.760,0	1.475.760,0
01.EBA.963.142	Pengelolaan Infrastruktur Sistem Informasi	0,0	Layanan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.143	Pengelolaan Data dan Informasi	1,0	Layanan	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	1,0	345.600,0	414.720,0	414.720,0
01.EBA.963.144	Pengelolaan Penyajian Informasi	3,0	Layanan	250.000,0	750.000,0	4,0	4,0	4,0	1.598.400,0	1.918.080,0	1.918.080,0
02	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi pencarian dan pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan				3.916.652,0				90.900.000,0	84.000.000,0	84.000.000,0
02.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	Unit		3.916.652,0				60.900.000,0	74.000.000,0	74.000.000,0
02.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi	0	Unit		3.916.652,0	23	11	11	60.900.000,0	74.000.000,0	74.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi pencarian dan pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan		3.916.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916.652,0
02.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		3.916.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916.652,0
02.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi		3.916.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916.652,0
02.CAN.001.141	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi	Utama	3.916.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916.652,0
02.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.RAN.001	Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.RAN.001.141	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan		17.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.450.000,0
03.RCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		17.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.450.000,0
03.RCL.001	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)		17.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.450.000,0
03.RCL.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	17.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.450.000,0
Total			23.166.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.166.652,0

Jakarta, 12 November 2021
 SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
 NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi pencarian dan pertolongan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan		3.916.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916.652,0
02.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		3.916.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916.652,0
02.CAN.001	Peralatan Teknologi Informasi		3.916.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916.652,0
02.CAN.001.141	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi	Utama	3.916.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.916.652,0
02.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.RAN.001	Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.RAN.001.141	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan		17.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.450.000,0
03.RCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		17.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.450.000,0
03.RCL.001	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)		17.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.450.000,0
03.RCL.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	17.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.450.000,0
Total			23.166.652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.166.652,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM

:

WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM

:

01 - Meningkatkan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
03 - Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
04 - Meningkatkan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatkan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
07 - Meningkatkan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)
4. KEGIATAN

:

4021 - Pengawasan dan Pembinaan Internal
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

09 - Inspektorat

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman, kepatuhan audit dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran dan kualitas laporan hasil pengawasan serta Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi		5.500.000,0
01.01	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman	100	
01.02	Persentase kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan intern dan ekstern	100	
01.03	Persentase laporan hasil pengawasan sesuai pedoman	100	
01.04	Persentase temuan hasil pemeriksaan intern yang berindikasi tindak pidana korupsi	100	
02	Meningkatnya level APIP pada Internal Audit Capability Model (IACM)		400.000,0
02.01	Tingkat level kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan	Level 3	
03	Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien		100.000,0
03.01	Persentase dokumen yang dikelola	100	
03.02	Persentase efisien dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan	100	
Total			6.000.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman, kepatuhan audit dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran dan kualitas laporan hasil pengawasan serta Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi</i>										5.500.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							5.500.000,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal								000 - Bukan Tematik		5.500.000,0
	151 - Audit Kinerja										3.357.027,0
		Pusat	Pusat								3.357.027,0
	152 - Reviu										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0
	153 - Evaluasi										600.000,0
		Pusat	Pusat								600.000,0
	154 - Pemantauan										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0
	155 - Pengawasan Lainnya										342.973,0
		Pusat	Pusat								342.973,0
02	<i>Meningkatnya level APIP pada Internal Audit Capability Model (IACM)</i>										400.000,0
02.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								000 - Bukan Tematik		400.000,0
	151 - Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0
03	<i>Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien</i>										100.000,0
03.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							100.000,0
03.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		100.000,0
	151 - Pengelolaan Ketatausahaan Inspektorat										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
Total											6.000.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman, kepatuhan audit dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran dan kualitas laporan hasil pengawasan serta Menurunnya temuan pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi				5.500.000,0				9.357.027,0	9.957.027,0	9.957.027,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19	Dokumen/Layanan/Laporan		5.500.000,0				9.357.027,0	9.957.027,0	9.957.027,0
01.EBD.965	Layanan Audit Internal	19	Dokumen		5.500.000,0	18	18	18	9.357.027,0	9.957.027,0	9.957.027,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.965.154	Pemantauan	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.EBD.965.155	Pengawasan Lainnya	Utama	342.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342.973,0
02	Meningkatnya level APIP pada Internal Audit Capability Model (IACM)		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
02.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
02.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
02.EBC.996.151	Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
03	Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.EBA.962	Layanan Umum		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.EBA.962.151	Pengelolaan Ketatausahaan Inspektorat	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Total			6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0

Jakarta, 12 November 2021
 SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
 NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.965.154	Pemantauan	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.EBD.965.155	Pengawasan Lainnya	Utama	342.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342.973,0
02	Meningkatnya level APIP pada Internal Audit Capability Model (IACM)		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
02.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
02.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
02.EBC.996.151	Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
03	Meningkatnya pengelolaan persuratan secara tertib dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.EBA.962	Layanan Umum		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.EBA.962.151	Pengelolaan Ketatausahaan Inspektorat	Utama	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
Total			6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM : BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatkan kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatkan kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan
03 - Meningkatkan keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
04 - Meningkatkan keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatkan kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
4. KEGIATAN : 3946 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 05 - Direktorat Sarana dan Prasarana

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas		239.107.857,0
01.01	Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat	65,15	
01.02	Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut	49,86	
01.03	Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara	79,17	
01.04	Persentase pemenuhan peralatan pencarian dan pertolongan	45,67	
01.05	Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	37,47	
01.06	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana	2	
01.07	Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan	2	
02	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana		1.500.000,0
02.01	Indeks pemenuhan dukungan sarana dan prasarana	90	
02.02	Indeks pemenuhan dukungan perbekalan	90	
03	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan		463.910.000,0
03.01	Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat	96,16	
03.02	Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut	89,04	

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.CAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							23.875.000,0
01.CAP.001	Sarana SAR Lainnya								000 - Bukan Tematik		600.000,0
	211 - Pengadaan Sarana SAR Lainnya										600.000,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								0,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								600.000,0
01.CAP.002	Peralatan SAR Lainnya								000 - Bukan Tematik		23.275.000,0
	212 - Pengadaan Peralatan SAR Lainnya										23.275.000,0
		Pusat	Pusat								18.700.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								90.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								90.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								90.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								90.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								90.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								90.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Banten	Kab. Serang								90.000,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								90.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								90.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								105.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								90.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								90.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								90.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								90.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								120.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								90.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								1.000.000,0
01.RAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							211.739.504,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.RAP.001	Sarana SAR Pesawat Fixed Wing (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		0,0
	211 - Pengadaan Sarana SAR Pesawat Fixed Wing (Prioritas Nasional)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.RAP.002	Sarana SAR Medium Helikopter (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		0,0
	212 - Pengadaan Sarana SAR Medium Helikopter (Prioritas Nasional)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.RAP.003	Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		0,0
	213 - Pengadaan Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 (Prioritas Nasional)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.RAP.004	Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		0,0
	214 - Pengadaan Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 (Prioritas Nasional)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.RAP.005	Sarana SAR Rescue Boat Kelas 1 (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		60.920.884,0
	215 - Pengadaan Sarana SAR Rescue Boat Kelas 1 (Prioritas Nasional)										60.920.884,0
		Pusat	Pusat								60.920.884,0
01.RAP.006	Sarana SAR Rescue Boat Kelas 2 (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		0,0
	216 - Pengadaan Sarana SAR Rescue Boat Kelas 2 (Prioritas Nasional)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.RAP.013	Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		19.161.120,0
	223 - Pengadaan Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional)										19.161.120,0
		Pusat	Pusat								19.161.120,0
01.RAP.014	Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		0,0
	224 - Pengadaan Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.RAP.015	Peralatan SAR (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		60.657.500,0
	225 - Pengadaan Peralatan SAR (Prioritas Nasional)										60.657.500,0
		Pusat	Pusat								60.000.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								277.500,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								0,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								180.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								200.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								0,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								0,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.RBH	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							1.993.353,0
01.RBH.001	Prasarana SAR (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		1.993.353,0
	211 - Pengadaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								0,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								213.952,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								0,0

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								278.018.178,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								1.410.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								4.214.368,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.411.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								5.682.824,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								2.400.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								9.646.472,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								4.121.824,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								5.549.478,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								3.229.824,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								2.817.824,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								3.513.824,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								4.131.368,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								2.493.929,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								3.150.824,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								3.454.824,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								4.112.368,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								1.815.286,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								4.280.121,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								3.589.824,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								3.511.824,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								3.717.824,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								8.119.775,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								8.083.337,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								6.267.648,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								5.088.824,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								3.984.368,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								9.141.232,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								3.163.753,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								3.136.368,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.818.192,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								2.992.368,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								3.442.368,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								2.438.368,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								3.187.753,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								4.519.648,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								8.135.560,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								3.960.192,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								3.880.192,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								30.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								245.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								45.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								30.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								230.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								15.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								15.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								15.000,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								230.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								15.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								15.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								15.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								445.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								15.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								45.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								15.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								30.000,0
Total											704.517.857,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas				239.107.857,0				3.406.424.759,0	2.522.293.951,0	2.522.293.951,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK/Rancangan Standar/Pedoman/Standar		1.500.000,0				4.000.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0
01.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana SAR	5	NSPK		1.500.000,0	8	5	5	4.000.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0
01.AFA.001.211	Penyusunan Rencana dan Pengembangan Sarana dan Prasarana SAR	2,0	NSPK	438.000,0	876.000,0	4,0	3,0	3,0	2.500.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
01.AFA.001.212	Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana SAR	3,0	NSPK	208.000,0	624.000,0	4,0	2,0	2,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.CAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	12400	Unit		23.875.000,0				204.650.460,0	183.273.580,0	183.273.580,0
01.CAP.001	Sarana SAR Lainnya	1	Unit		600.000,0	151	145	145	108.105.710,0	85.602.830,0	85.602.830,0
01.CAP.001.211	Pengadaan Sarana SAR Lainnya	1,0	Unit	600.000,0	600.000,0	151,0	145,0	145,0	108.105.710,0	85.602.830,0	85.602.830,0
01.CAP.002	Peralatan SAR Lainnya	12399	Unit		23.275.000,0	10030	10131	10131	96.544.750,0	97.670.750,0	97.670.750,0
01.CAP.002.212	Pengadaan Peralatan SAR Lainnya	12.399,0	Unit	1.877,2	23.275.000,0	10.030,0	10.131,0	10.131,0	96.544.750,0	97.670.750,0	97.670.750,0
01.RAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	81	Unit		211.739.504,0				2.939.121.780,0	2.137.180.000,0	2.137.180.000,0
01.RAP.001	Sarana SAR Pesawat Fixed Wing (Prioritas Nasional)	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.RAP.001.211	Pengadaan Sarana SAR Pesawat Fixed Wing (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.RAP.002	Sarana SAR Medium Helikopter (Prioritas Nasional)	0	Unit		0,0	1	2	2	695.400.000,0	439.200.000,0	439.200.000,0
01.RAP.002.212	Pengadaan Sarana SAR Medium Helikopter (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	1,0	2,0	2,0	695.400.000,0	439.200.000,0	439.200.000,0
01.RAP.003	Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 (Prioritas Nasional)	0	Unit		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.RAP.003.213	Pengadaan Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.RAP.004	Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 (Prioritas Nasional)	0	Unit		0,0	2	0	0	392.000.000,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.RAP.004.214	Pengadaan Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	2,0	0,0	0,0	392.000.000,0	0,0	0,0
01.RAP.005	Sarana SAR Rescue Boat Kelas 1 (Prioritas Nasional)	1	Unit		60.920.884,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.RAP.005.215	Pengadaan Sarana SAR Rescue Boat Kelas 1 (Prioritas Nasional)	1,0	Unit	60.920.884,0	60.920.884,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.RAP.006	Sarana SAR Rescue Boat Kelas 2 (Prioritas Nasional)	0	Unit		0,0	6	6	6	360.000.000,0	360.000.000,0	360.000.000,0
01.RAP.006.216	Pengadaan Sarana SAR Rescue Boat Kelas 2 (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	6,0	6,0	6,0	360.000.000,0	360.000.000,0	360.000.000,0
01.RAP.007	Sarana SAR Rigid Inflatable Boat Kelas 1 (Prioritas Nasional)	6	Unit		30.000.000,0	15	15	15	75.000.000,0	75.000.000,0	75.000.000,0
01.RAP.007.217	Pengadaan Sarana SAR Rigid Inflatable Boat Kelas 1 (Prioritas Nasional)	6,0	Unit	5.000.000,0	30.000.000,0	15,0	15,0	15,0	75.000.000,0	75.000.000,0	75.000.000,0
01.RAP.008	Sarana SAR Rigid Inflatable Boat Kelas 2 (Prioritas Nasional)	4	Unit		18.000.000,0	15	15	15	67.500.000,0	67.500.000,0	67.500.000,0
01.RAP.008.218	Pengadaan Sarana SAR Rigid Inflatable Boat Kelas 2 (Prioritas Nasional)	4,0	Unit	4.500.000,0	18.000.000,0	15,0	15,0	15,0	67.500.000,0	67.500.000,0	67.500.000,0
01.RAP.009	Sarana SAR Landing Craft (Prioritas Nasional)	20	Unit		10.400.000,0	80	80	80	36.000.000,0	36.000.000,0	36.000.000,0
01.RAP.009.219	Pengadaan Sarana SAR Landing Craft (Prioritas Nasional)	20,0	Unit	520.000,0	10.400.000,0	80,0	80,0	80,0	36.000.000,0	36.000.000,0	36.000.000,0
01.RAP.010	Sarana SAR Rafting Boat (Prioritas Nasional)	0	Unit		0,0	40	40	40	8.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.RAP.010.220	Pengadaan Sarana SAR Rafting Boat (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	40,0	40,0	40,0	8.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0
01.RAP.011	Sarana SAR Rescue Car Tipe I (Prioritas Nasional)	0	Unit		0,0	20	20	20	37.500.000,0	37.500.000,0	37.500.000,0
01.RAP.011.221	Pengadaan Sarana SAR Rescue Car Tipe I (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	20,0	20,0	20,0	37.500.000,0	37.500.000,0	37.500.000,0
01.RAP.012	Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional)	14	Unit		12.600.000,0	34	34	34	32.000.000,0	32.000.000,0	32.000.000,0
01.RAP.012.222	Pengadaan Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional)	14,0	Unit	900.000,0	12.600.000,0	34,0	34,0	34,0	32.000.000,0	32.000.000,0	32.000.000,0
01.RAP.013	Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional)	4	Unit		19.161.120,0	14	0	0	81.000.000,0	0,0	0,0
01.RAP.013.223	Pengadaan Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional)	4,0	Unit	4.790.280,0	19.161.120,0	14,0	0,0	0,0	81.000.000,0	0,0	0,0
01.RAP.014	Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional)	0	Unit		0,0	33	23	23	66.000.000,0	46.000.000,0	46.000.000,0
01.RAP.014.224	Pengadaan Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	33,0	23,0	23,0	66.000.000,0	46.000.000,0	46.000.000,0
01.RAP.015	Peralatan SAR (Prioritas Nasional)	32	Unit		60.657.500,0	398	402	402	1.088.721.780,0	1.035.980.000,0	1.035.980.000,0
01.RAP.015.225	Pengadaan Peralatan SAR (Prioritas Nasional)	169,0	Unit	358.920,1	60.657.500,0	398,0	402,0	402,0	1.088.721.780,0	1.035.980.000,0	1.035.980.000,0
01.RBH	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	4	unit		1.993.353,0				258.652.519,0	198.340.371,0	198.340.371,0
01.RBH.001	Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	4	unit		1.993.353,0	39	28	28	258.652.519,0	198.340.371,0	198.340.371,0
01.RBH.001.211	Pengadaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	0,0	Unit	NaN	0,0	8,0	13,0	13,0	89.600.000,0	83.210.035,0	83.210.035,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.RBH.001.212	Pembangunan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	4,0	Unit	498.338,3	1.993.353,0	31,0	15,0	15,0	169.052.519,0	115.130.336,0	115.130.336,0
02	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana				1.500.000,0				1.000.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
02.AEA	Koordinasi	3	kegiatan		1.500.000,0				1.000.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
02.AEA.001	Dukungan Sarana dan Prasarana SAR	3	kegiatan		1.500.000,0	2	3	3	1.000.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
02.AEA.001.211	Pelaksanaan Dukungan Perbekalan SAR	2,0	Kegiatan	500.000,0	1.000.000,0	1,0	2,0	2,0	500.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
02.AEA.001.212	Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana SAR	1,0	Kegiatan	500.000,0	500.000,0	1,0	1,0	1,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
03	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan				463.910.000,0				525.853.405,0	599.341.978,0	599.341.978,0
03.RCM	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	2389	Unit		459.419.610,0				521.099.445,0	593.708.018,0	593.708.018,0
03.RCM.001	Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	2389	Unit		459.419.610,0	2219	2266	2266	521.099.445,0	593.708.018,0	593.708.018,0
03.RCM.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2.388,0	Unit	192.386,8	459.419.610,0	2.219,0	2.266,0	2.266,0	521.099.445,0	593.708.018,0	593.708.018,0
03.RDH	OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	111	unit		4.490.390,0				4.753.960,0	5.633.960,0	5.633.960,0
03.RDH.001	Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	111	unit		4.490.390,0	121	130	130	4.753.960,0	5.633.960,0	5.633.960,0
03.RDH.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	109,0	Unit	41.196,2	4.490.390,0	119,0	128,0	128,0	4.753.960,0	5.633.960,0	5.633.960,0
Total					704.517.857,0	-	-	-	3.933.278.164,0	3.123.135.929,0	3.123.135.929,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
02.AEA	Koordinasi		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
02.AEA.001	Dukungan Sarana dan Prasarana SAR		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
02.AEA.001.211	Pelaksanaan Dukungan Perbekalan SAR	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
02.AEA.001.212	Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana SAR	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
03	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan		463.910.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463.910.000,0
03.RCM	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		459.419.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459.419.610,0
03.RCM.001	Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)		459.419.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459.419.610,0
03.RCM.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	459.419.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459.419.610,0
03.RDH	OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		4.490.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.490.390,0
03.RDH.001	Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)		4.490.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.490.390,0
03.RDH.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	4.490.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.490.390,0
Total			704.517.857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704.517.857,0

Jakarta, 12 November 2021
 SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
 NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
02.AEA	Koordinasi		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
02.AEA.001	Dukungan Sarana dan Prasarana SAR		1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
02.AEA.001.211	Pelaksanaan Dukungan Perbekalan SAR	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
02.AEA.001.212	Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana SAR	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
03	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan		463.910.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463.910.000,0
03.RCM	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		459.419.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459.419.610,0
03.RCM.001	Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)		459.419.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459.419.610,0
03.RCM.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	459.419.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459.419.610,0
03.RDH	OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		4.490.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.490.390,0
03.RDH.001	Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)		4.490.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.490.390,0
03.RDH.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	4.490.390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.490.390,0
Total			704.517.857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704.517.857,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM : BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan
03 - Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
04 - Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
4. KEGIATAN : 3947 - Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 06 - Direktorat Bina Tenaga

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Terwujudnya peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional		42.210.240,0
01.01	Persentase tersedianya bahan pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengelolaan tenaga	100	
01.02	Persentase pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kompetensi tenaga	100	
01.03	Persentase pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penilaian jabatan fungsional	100	
02	Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis pencarian dan pertolongan		15.212.024,0
02.01	Persentase tersusunnya analisis pengembangan kompetensi tenaga teknis yang dihasilkan	100	
02.02	Persentase pemantauan dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis pencarian dan pertolongan	100	
02.03	Persentase norma dan kebijakan pembinaan tenaga teknis pencarian dan pertolongan yang dihasilkan	100	
03	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		12.167.988,0
03.01	Persentase kelulusan peserta diklat teknis pencarian dan pertolongan	95	
Total			69.590.252,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								148.320,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								168.920,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								49.440,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								214.240,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								177.160,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								230.720,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								238.960,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								156.560,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								28.840,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								247.200,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								144.200,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							4.250.000,0
02.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Tenaga SAR								000 - Bukan Tematik		4.250.000,0
	311 - Penyusunan Rencana dan Pengembangan Tenaga SAR										1.900.000,0
		Pusat	Pusat								1.900.000,0
	312 - Penyusunan Standardisasi Tenaga SAR										2.350.000,0
		Pusat	Pusat								2.350.000,0
02.DCK	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							10.962.024,0
02.DCK.U01	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Petugas SAR								000 - Bukan Tematik		0,0

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								600.000,0
Total											69.590.252,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Terwujudnya peningkatan pembinaan, sertifikasi, dan penilaian tenaga dan pengelolaan jabatan fungsional				42.210.240,0				44.480.031,0	47.705.031,0	47.705.031,0
01.DCK	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	4150	Orang/Kegiatan		42.210.240,0				44.480.031,0	47.705.031,0	47.705.031,0
01.DCK.001	Pembinaan Tenaga SAR	1764	Orang		42.210.240,0	71	75	75	44.480.031,0	47.705.031,0	47.705.031,0
01.DCK.001.311	Pelaksanaan Penyiapan Tenaga SAR	1.752,0	Orang	21.255,6	37.239.740,0	60,0	63,0	63,0	39.930.031,0	42.705.031,0	42.705.031,0
01.DCK.001.312	Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga SAR	6,0	Orang	459.583,3	2.757.500,0	8,0	8,0	8,0	3.350.000,0	3.400.000,0	3.400.000,0
01.DCK.001.313	Pengelolaan Jabatan Fungsional	6,0	Orang	368.833,3	2.213.000,0	3,0	4,0	4,0	1.200.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0
02	Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis pencarian dan pertolongan				15.212.024,0				8.400.000,0	8.650.000,0	8.650.000,0
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14	NSPK/Rancangan Standar/Pedoman/Standar		4.250.000,0				8.400.000,0	8.650.000,0	8.650.000,0
02.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Tenaga SAR	14	NSPK		4.250.000,0	14	13	13	8.400.000,0	8.650.000,0	8.650.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
02.AFA.001.311	Penyusunan Rencana dan Pengembangan Tenaga SAR	7,0	NSPK	271.428,6	1.900.000,0	9,0	8,0	8,0	5.400.000,0	5.350.000,0	5.350.000,0
02.AFA.001.312	Penyusunan Standardisasi Tenaga SAR	7,0	NSPK	335.714,3	2.350.000,0	5,0	5,0	5,0	3.000.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
02.DCK	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	4150	Orang/Kegiatan		10.962.024,0				0,0	0,0	0,0
02.DCK.U01	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Petugas SAR		Orang		0,0				0,0	0,0	0,0
02.DCK.U02	Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR	1983	Orang		10.962.024,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.DCK.U02.312	Pelaksanaan Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR	1.983,0	Orang	5.528,0	10.962.024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				12.167.988,0				15.398.000,0	14.648.000,0	14.648.000,0
03.DCK	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	4150	Orang/Kegiatan		12.167.988,0				15.398.000,0	14.648.000,0	14.648.000,0
03.DCK.002	Diklat Tenaga SAR	3	Orang		2.736.788,0	18	14	14	9.598.000,0	8.498.000,0	8.498.000,0
03.DCK.002.314	Penyelenggaraan Diklat	3,0	Orang	912.262,7	2.736.788,0	18,0	14,0	14,0	9.598.000,0	8.498.000,0	8.498.000,0
03.DCK.U03	Diklat Dasar SAR	120	Orang		4.992.000,0	2	2	2	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
03.DCK.U03.313	Pelaksanaan Diklat Dasar SAR	120,0	Orang	41.600,0	4.992.000,0	2,0	2,0	2,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
03.DCK.U04	Diklat Perencanaan Operasi SAR	40	Orang		653.600,0	2	3	3	700.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
03.DCK.U04.314	Pelaksanaan Diklat Perencanaan Operasi SAR	40,0	Orang	16.340,0	653.600,0	2,0	3,0	3,0	700.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0
03.DCK.U05	Diklat SAR di Air	80	Orang		1.309.600,0	2	2	2	900.000,0	900.000,0	900.000,0
03.DCK.U05.315	Pelaksanaan Diklat SAR di Air	80,0	Orang	16.370,0	1.309.600,0	2,0	2,0	2,0	900.000,0	900.000,0	900.000,0
03.DCK.U06	Diklat SAR di Bangunan Runtuh	80	Orang		1.360.000,0	1	1	1	500.000,0	500.000,0	500.000,0
03.DCK.U06.316	Pelaksanaan Diklat SAR di Bangunan Runtuh	80,0	Orang	17.000,0	1.360.000,0	1,0	1,0	1,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
03.DCK.U07	Diklat Teknisi Komunikasi SAR	40	Orang		516.000,0	1	1	1	400.000,0	400.000,0	400.000,0
03.DCK.U07.317	Pelaksanaan Diklat Teknisi Komunikasi SAR	40,0	Orang	12.900,0	516.000,0	1,0	1,0	1,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0
03.DCK.U08	Diklat Medical First Responder	40	Orang		600.000,0	2	2	2	800.000,0	800.000,0	800.000,0
03.DCK.U08.318	Pelaksanaan Diklat Medical First Responder	40,0	Orang	15.000,0	600.000,0	2,0	2,0	2,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0
Total					69.590.252,0	-	-	-	68.278.031,0	71.003.031,0	71.003.031,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.DCK.U04.314	Pelaksanaan Diklat Perencanaan Operasi SAR	Utama	653.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	653.600,0
03.DCK.U05	Diklat SAR di Air		1.309.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.600,0
03.DCK.U05.315	Pelaksanaan Diklat SAR di Air	Utama	1.309.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.600,0
03.DCK.U06	Diklat SAR di Bangunan Runtuh		1.360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360.000,0
03.DCK.U06.316	Pelaksanaan Diklat SAR di Bangunan Runtuh	Utama	1.360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360.000,0
03.DCK.U07	Diklat Teknisi Komunikasi SAR		516.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516.000,0
03.DCK.U07.317	Pelaksanaan Diklat Teknisi Komunikasi SAR	Utama	516.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516.000,0
03.DCK.U08	Diklat Medical First Responder		600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
03.DCK.U08.318	Pelaksanaan Diklat Medical First Responder	Utama	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
Total			69.590.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.590.252,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.DCK.U04.314	Pelaksanaan Diklat Perencanaan Operasi SAR	Utama	653.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	653.600,0
03.DCK.U05	Diklat SAR di Air		1.309.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.600,0
03.DCK.U05.315	Pelaksanaan Diklat SAR di Air	Utama	1.309.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.309.600,0
03.DCK.U06	Diklat SAR di Bangunan Runtuh		1.360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360.000,0
03.DCK.U06.316	Pelaksanaan Diklat SAR di Bangunan Runtuh	Utama	1.360.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.360.000,0
03.DCK.U07	Diklat Teknisi Komunikasi SAR		516.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516.000,0
03.DCK.U07.317	Pelaksanaan Diklat Teknisi Komunikasi SAR	Utama	516.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516.000,0
03.DCK.U08	Diklat Medical First Responder		600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
03.DCK.U08.318	Pelaksanaan Diklat Medical First Responder	Utama	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
Total			69.590.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.590.252,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM : BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan
03 - Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
04 - Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
4. KEGIATAN : 3948 - Pengelolaan Operasi SAR
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 07 - Direktorat Operasi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan Operasi SAR serta meningkatnya waktu tanggap (response time) pada penyelenggaraan Operasi SAR demi terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan Operasi SAR		45.000.000,0
01.01	Persentase kegiatan pelayanan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	100	
01.02	Persentase pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pengerahan potensi dan pengendalian operasi pencarian dan pertolongan	100	
01.03	Waktu tanggap (response time) di setiap pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan kapal, pesawat udara, penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia	26	
01.04	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan kapal, pesawat udara, penanganan khusus, bencana dan kondisi membahayakan manusia	100	
02	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan		5.102.408,0
02.01	Persentase koordinasi pengerahan dan pengendalian potensi dalam operasi pencarian dan pertolongan	100	
02.02	Persentase pelaksanaan kegiatan dengan organisasi internasional	100	
03	Meningkatnya pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan		8.780.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
03.01	Persentase dokumen penyiapan prosedur perijinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	100	
03.02	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi dukungan operasi pencarian dan pertolongan	100	
03.03	Persentase dokumen penyiapan sarana, logistik dan perbekalan operasi pencarian dan pertolongan	100	
03.04	Persentase pelaksanaan kegiatan dukungan operasi pencarian dan pertolongan	100	
03.05	Persentase pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Khusus Operasi Pencarian dan Pertolongan	100	
04	Meningkatnya akuntabilitas penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan		15.000.000,0
04.01	Persentase dokumen akuntabilitas penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan yang terselesaikan	100	
04.02	Persentase dokumen penyusunan laporan operasi pencarian dan pertolongan	100	
05	Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan		1.111.120,0
05.01	Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan	100	
05.02	Persentase penyusunan dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	100	
Total			74.993.528,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								160.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								160.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								160.000,0
	413 - Pelaksanaan Satuan Tugas Khusus Operasi										1.200.000,0
		Pusat	Pusat								1.200.000,0
04	<i>Meningkatnya akuntabilitas penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan</i>										15.000.000,0
04.QHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							15.000.000,0
04.QHC.002	Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		15.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	412 - Penatausahaan Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)										15.000.000,0
		Pusat	Pusat								15.000.000,0
05	<i>Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan</i>										1.111.120,0
05.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							1.111.120,0
05.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR								000 - Bukan Tematik		1.111.120,0
	411 - Penyusunan Rencana dan Pengembangan Operasi SAR										639.680,0
		Pusat	Pusat								639.680,0
	412 - Penyusunan Standardisasi Operasi SAR										471.440,0
		Pusat	Pusat								471.440,0
Total											74.993.528,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan Operasi SAR serta meningkatnya waktu tanggap (response time) pada penyelenggaraan Operasi SAR demi terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan Operasi SAR				45.000.000,0				76.574.631,0	79.513.631,0	79.513.631,0
01.QHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	44	operasi		45.000.000,0				76.574.631,0	79.513.631,0	79.513.631,0
01.QHC.001	Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	43	operasi		45.000.000,0	43	43	43	76.574.631,0	79.513.631,0	79.513.631,0
01.QHC.001.411	Pengeralahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (Prioritas Nasional)	43,0	Operasi	1.046.511,6	45.000.000,0	43,0	43,0	43,0	76.574.631,0	79.513.631,0	79.513.631,0
02	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan				5.102.408,0				9.760.320,0	11.712.384,0	11.712.384,0
02.BHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	6	operasi		5.102.408,0				9.760.320,0	11.712.384,0	11.712.384,0
02.BHC.001	Pengeralahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR	6	operasi		5.102.408,0	7	7	7	9.760.320,0	11.712.384,0	11.712.384,0
02.BHC.001.411	Pengeralahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara	3,0	Operasi	455.389,3	1.366.168,0	4,0	5,0	5,0	6.304.320,0	8.601.984,0	8.601.984,0
02.BHC.001.412	Pengeralahan Potensi dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia	3,0	Operasi	1.245.413,3	3.736.240,0	3,0	2,0	2,0	3.456.000,0	3.110.400,0	3.110.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
03	Meningkatnya pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan				8.780.000,0				31.107.570,0	31.952.763,0	31.952.763,0
03.AEA	Koordinasi	47	kegiatan		8.780.000,0				31.107.570,0	31.952.763,0	31.952.763,0
03.AEA.001	Dukungan Operasi SAR	47	kegiatan		8.780.000,0	75	74	74	31.107.570,0	31.952.763,0	31.952.763,0
03.AEA.001.411	Penatausahaan Dukungan Operasi SAR	1,0	Kegiatan	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	1,0	720.000,0	864.000,0	864.000,0
03.AEA.001.412	Pelaksanaan Dukungan Operasi SAR	44,0	Kegiatan	167.727,3	7.380.000,0	72,0	71,0	71,0	29.187.570,0	29.888.763,0	29.888.763,0
03.AEA.001.413	Pelaksanaan Satuan Tugas Khusus Operasi	1,0	Kegiatan	1.200.000,0	1.200.000,0	1,0	1,0	1,0	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
04	Meningkatnya akuntabilitas penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan				15.000.000,0				28.800.000,0	34.560.000,0	34.560.000,0
04.QHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	44	operasi		15.000.000,0				28.800.000,0	34.560.000,0	34.560.000,0
04.QHC.002	Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	1	operasi		15.000.000,0	1	1	1	28.800.000,0	34.560.000,0	34.560.000,0
04.QHC.002.412	Penatausahaan Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	1,0	Operasi	15.000.000,0	15.000.000,0	1,0	1,0	1,0	28.800.000,0	34.560.000,0	34.560.000,0
05	Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan				1.111.120,0				5.902.000,0	6.952.400,0	6.952.400,0
05.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK/Rancangan Standar/Pedoman/Standar		1.111.120,0				5.902.000,0	6.952.400,0	6.952.400,0
05.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR	6	NSPK		1.111.120,0	8	8	8	5.902.000,0	6.952.400,0	6.952.400,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.AEA	Koordinasi		8.780.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.780.000,0
03.AEA.001	Dukungan Operasi SAR		8.780.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.780.000,0
03.AEA.001.411	Penatausahaan Dukungan Operasi SAR	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
03.AEA.001.412	Pelaksanaan Dukungan Operasi SAR	Utama	7.380.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.380.000,0
03.AEA.001.413	Pelaksanaan Satuan Tugas Khusus Operasi	Utama	1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0
04	Meningkatnya akuntabilitas penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan		15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
04.QHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
04.QHC.002	Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)		15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
04.QHC.002.412	Penatausahaan Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	Utama	15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
05	Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan		1.111.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.111.120,0
05.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.111.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.111.120,0
05.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR		1.111.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.111.120,0
05.AFA.001.411	Penyusunan Rencana dan Pengembangan Operasi SAR	Utama	639.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639.680,0
05.AFA.001.412	Penyusunan Standardisasi Operasi SAR	Utama	471.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471.440,0
Total			74.993.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.993.528,0

Jakarta, 12 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.AEA	Koordinasi		8.780.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.780.000,0
03.AEA.001	Dukungan Operasi SAR		8.780.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.780.000,0
03.AEA.001.411	Penatausahaan Dukungan Operasi SAR	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
03.AEA.001.412	Pelaksanaan Dukungan Operasi SAR	Utama	7.380.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.380.000,0
03.AEA.001.413	Pelaksanaan Satuan Tugas Khusus Operasi	Utama	1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0
04	Meningkatnya akuntabilitas penggantian biaya operasi pencarian dan pertolongan		15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
04.QHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana		15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
04.QHC.002	Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)		15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
04.QHC.002.412	Penatausahaan Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	Utama	15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000.000,0
05	Terwujudnya perencanaan pengembangan dan evaluasi yang baik dan tepat dengan didukung oleh standar prosedur serta kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan		1.111.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.111.120,0
05.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.111.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.111.120,0
05.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Operasi SAR		1.111.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.111.120,0
05.AFA.001.411	Penyusunan Rencana dan Pengembangan Operasi SAR	Utama	639.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639.680,0
05.AFA.001.412	Penyusunan Standardisasi Operasi SAR	Utama	471.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471.440,0
Total			74.993.528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74.993.528,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

:

BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM

:

BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
3. SASARAN PROGRAM

:

01 - Meningkatkan kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatkan kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan
03 - Meningkatkan keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
04 - Meningkatkan keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatkan kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
4. KEGIATAN

:

3949 - Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

:

08 - Direktorat Komunikasi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya perencanaan sistem komunikasi yang berkualitas dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi		51.413.503,0
01.01	Jumlah norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis yang disahkan	2	
01.02	Jumlah dokumen rencana pengembangan dan evaluasi sistem komunikasi	2	
01.03	Persentase pemenuhan sistem komunikasi sesuai standar kebutuhan	62.39	
01.04	Persentase ketersediaan suku cadang	28	
01.05	Persentase pelaksanaan sosialisasi dan optimalisasi sistem komunikasi	100	
02	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya		1.967.176,0
02.01	Indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan	95	
02.02	Jumlah orang yang telah mengikuti profesiensi	38	
02.03	Indeks kegiatan deteksi dini	95	
02.04	Jumlah registrasi data sinyal marabahaya	400	
03	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan		59.540.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								350.000,0
	512 - Penyusunan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	513 - Inventarisasi Peralatan Komunikasi SAR										350.000,0
		Pusat	Pusat								350.000,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							50.513.503,0
01.CAN.001	Peralatan Sistem Komunikasi SAR								000 - Bukan Tematik		50.513.503,0
	511 - Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR										50.513.503,0
		Pusat	Pusat								50.113.503,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								400.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								0,0
02	<i>Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya</i>										1.967.176,0
02.AEA	Koordinasi			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							1.967.176,0
02.AEA.001	Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi								000 - Bukan Tematik		1.967.176,0
	511 - Pelaksanaan Penyiapan Dukungan Komunikasi SAR										1.117.176,0
		Pusat	Pusat								1.117.176,0
	512 - Pelaksanaan Sertifikasi Pemancar Sinyal Marabahaya										850.000,0
		Pusat	Pusat								850.000,0
03	<i>Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan</i>										59.540.000,0
03.RCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							59.540.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								290.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								470.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								320.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								270.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								330.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								310.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								300.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								300.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								300.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								280.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								270.000,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								270.000,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								410.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								300.000,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								290.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								270.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								330.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								280.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								340.000,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								160.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								180.000,0
04	<i>Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)</i>										20.000.000,0
04.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							20.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.RAN.001	Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	000 - Bukan Tematik		20.000.000,0
	511 - Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)										20.000.000,0
		Pusat	Pusat								20.000.000,0
Total											132.920.679,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya perencanaan sistem komunikasi yang berkualitas dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi				51.413.503,0				88.720.000,0	94.035.000,0	94.035.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK/Rancangan Standar/Pedoman/Standar		900.000,0				11.950.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
01.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR	3	NSPK		900.000,0	7	7	7	11.950.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
01.AFA.001.511	Penyusunan Rencana dan Pengembangan Sistem Komunikasi SAR	1,0	NSPK	350.000,0	350.000,0	2,0	2,0	2,0	10.450.000,0	10.500.000,0	10.500.000,0
01.AFA.001.512	Penyusunan Standardisasi Sistem Komunikasi SAR	1,0	NSPK	200.000,0	200.000,0	4,0	4,0	4,0	1.300.000,0	1.300.000,0	1.300.000,0
01.AFA.001.513	Inventarisasi Peralatan Komunikasi SAR	1,0	NSPK	350.000,0	350.000,0	1,0	1,0	1,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit		50.513.503,0				76.770.000,0	82.035.000,0	82.035.000,0
01.CAN.001	Peralatan Sistem Komunikasi SAR	2	Unit		50.513.503,0	12	17	17	76.770.000,0	82.035.000,0	82.035.000,0
01.CAN.001.511	Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR	2,0	Unit	25.256.751,5	50.513.503,0	12,0	17,0	17,0	76.770.000,0	82.035.000,0	82.035.000,0
02	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya				1.967.176,0				3.250.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
02.AEA	Koordinasi	6	kegiatan		1.967.176,0				3.250.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
02.AEA.001	Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi	6	kegiatan		1.967.176,0	6	6	6	3.250.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
02.AEA.001.511	Pelaksanaan Penyiapan Dukungan Komunikasi SAR	3,0	Kegiatan	372.392,0	1.117.176,0	3,0	3,0	3,0	1.800.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
02.AEA.001.512	Pelaksanaan Sertifikasi Pemancar Sinyal Marabahaya	3,0	Kegiatan	283.333,3	850.000,0	3,0	3,0	3,0	1.450.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
03	Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan				59.540.000,0				59.800.000,0	60.694.000,0	60.694.000,0
03.RCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	272	Unit		59.540.000,0				59.800.000,0	60.694.000,0	60.694.000,0
03.RCL.001	Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	272	Unit		59.540.000,0	278	283	283	59.800.000,0	60.694.000,0	60.694.000,0
03.RCL.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	272,0	Unit	218.897,1	59.540.000,0	278,0	283,0	283,0	59.800.000,0	60.694.000,0	60.694.000,0
04	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)				20.000.000,0				95.000.000,0	95.000.000,0	95.000.000,0
04.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	Unit		20.000.000,0				95.000.000,0	95.000.000,0	95.000.000,0
04.RAN.001	Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	4	Unit		20.000.000,0	2	2	2	95.000.000,0	95.000.000,0	95.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.RCL.001	Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)		59.540.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.540.000,0
03.RCL.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	59.540.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.540.000,0
04	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)		20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
04.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
04.RAN.001	Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)		20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
04.RAN.001.511	Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	Utama	20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
Total			132.920.679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132.920.679,0

Jakarta, 12 November 2021
 SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
 NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.RCL.001	Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)		59.540.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.540.000,0
03.RCL.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	59.540.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.540.000,0
04	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)		20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
04.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
04.RAN.001	Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)		20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
04.RAN.001.511	Pengadaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	Utama	20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000.000,0
Total			132.920.679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132.920.679,0

Jakarta, 12 November 2021
SEKRETARIS UTAMA



Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM : BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan
03 - Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
04 - Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
4. KEGIATAN : 3971 - Pembinaan Potensi SAR
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 10 - Direktorat Bina Potensi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Terlaksananya peningkatan efektivitas penyusunan rencana standardisasi, dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan		2.971.200,0
01.01	Persentase tersusunnya analisis kebutuhan potensi pencarian dan pertolongan	100	
01.02	Persentase pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan teknis potensi pencarian dan pertolongan	100	
01.03	Persentase norma dan kebijakan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan yang dihasilkan	100	
02	Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan		27.875.000,0
02.01	Persentase peningkatan keterlibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	100	
02.02	Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis potensi pencarian dan pertolongan	100	
02.03	Persentase pelaksanaan kegiatan penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	100	
03	Meningkatnya efektivitas pendataan potensi pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pemasyarakatan pencarian dan pertolongan		10.275.053,0
03.01	Persentase efektivitas pemutakhiran data potensi Pencarian dan Pertolongan	100	
03.02	Persentase partisipasi aktif peserta kegiatan pemasyarakatan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan	100	

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								278.750,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								278.750,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								278.750,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								278.750,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								278.750,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								278.750,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								278.750,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								278.750,0
02.QDC.U04	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan	000 - Bukan Tematik		6.690.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								50.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								50.000,0
Total											41.121.253,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Terlaksananya peningkatan efektivitas penyusunan rencana standardisasi, dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan				2.971.200,0				4.450.000,0	4.700.000,0	4.700.000,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6106	NSPK/Rancangan Standar/Pedoman/Standar		2.971.200,0				4.450.000,0	4.700.000,0	4.700.000,0
01.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Potensi SAR	6106	NSPK		2.971.200,0	6	6	6	4.450.000,0	4.700.000,0	4.700.000,0
01.AFA.001.611	Penyusunan Rencana dan Pengembangan Potensi SAR	3,0	NSPK	283.333,3	850.000,0	2,0	2,0	2,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.AFA.001.612	Penyusunan Standardisasi Potensi SAR	6.103,0	NSPK	347,6	2.121.200,0	4,0	4,0	4,0	3.450.000,0	3.700.000,0	3.700.000,0
02	Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan				27.875.000,0				49.290.000,0	50.896.040,0	50.896.040,0
02.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5000	Orang		27.875.000,0				49.290.000,0	50.896.040,0	50.896.040,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
02.QDC.U01	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air (Prioritas Nasional)	2250	Orang		12.543.750,0	10800	10950	10950	49.290.000,0	50.896.040,0	50.896.040,0
02.QDC.U01.611	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Air (Prioritas Nasional)	2.250,0	Orang	5.575,0	12.543.750,0	10.800,0	10.950,0	10.950,0	49.290.000,0	50.896.040,0	50.896.040,0
02.QDC.U02	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian (Prioritas Nasional)	800	Orang		4.460.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.QDC.U02.612	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian (Prioritas Nasional)	800,0	Orang	5.575,0	4.460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.QDC.U03	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)	750	Orang		4.181.250,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.QDC.U03.613	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)	750,0	Orang	5.575,0	4.181.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.QDC.U04	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)	1200	Orang		6.690.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.QDC.U04.614	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)	1.200,0	Orang	5.575,0	6.690.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Meningkatnya efektivitas pendataan potensi pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pemasyarakatan pencarian dan pertolongan				10.275.053,0				17.450.000,0	18.700.000,0	18.700.000,0
03.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5291	Orang		10.275.053,0				17.450.000,0	18.700.000,0	18.700.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.QDC.U02.612	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian (Prioritas Nasional)	Utama	4.460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.460.000,0
02.QDC.U03	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)		4.181.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.181.250,0
02.QDC.U03.613	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)	Utama	4.181.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.181.250,0
02.QDC.U04	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)		6.690.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.690.000,0
02.QDC.U04.614	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)	Utama	6.690.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.690.000,0
03	Meningkatnya efektivitas pendataan potensi pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pemasyarakatan pencarian dan pertolongan		10.275.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.275.053,0
03.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		10.275.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.275.053,0
03.BDC.001	Pembinaan Potensi SAR		10.275.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.275.053,0
03.BDC.001.611	Pelaksanaan Penyiapan Potensi SAR	Utama	4.494.771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.494.771,0
03.BDC.001.612	Pelaksanaan Sertifikasi Potensi SAR	Utama	1.296.532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.296.532,0
03.BDC.001.613	Pelaksanaan Pemasyarakatan Potensi SAR	Utama	4.483.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.483.750,0
Total			41.121.253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.121.253,0

Jakarta, 12 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.QDC.U02.612	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian (Prioritas Nasional)	Utama	4.460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.460.000,0
02.QDC.U03	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)		4.181.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.181.250,0
02.QDC.U03.613	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)	Utama	4.181.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.181.250,0
02.QDC.U04	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)		6.690.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.690.000,0
02.QDC.U04.614	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)	Utama	6.690.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.690.000,0
03	Meningkatnya efektivitas pendataan potensi pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pemasyarakatan pencarian dan pertolongan		10.275.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.275.053,0
03.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		10.275.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.275.053,0
03.BDC.001	Pembinaan Potensi SAR		10.275.053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.275.053,0
03.BDC.001.611	Pelaksanaan Penyiapan Potensi SAR	Utama	4.494.771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.494.771,0
03.BDC.001.612	Pelaksanaan Sertifikasi Potensi SAR	Utama	1.296.532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.296.532,0
03.BDC.001.613	Pelaksanaan Pemasyarakatan Potensi SAR	Utama	4.483.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.483.750,0
Total			41.121.253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.121.253,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL
2. PROGRAM : BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
02 - Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan
03 - Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
04 - Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
05 - Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
06 - Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
4. KEGIATAN : 3972 - Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 11 - Direktorat Kesiapsiagaan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan siaga SAR		19.788.302,0
01.01	Persentase penyiapan penyusunan kebutuhan di bidang siaga	100	
01.02	Persentase meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang siaga	100	
01.03	Persentase meningkatnya pelaksanaan kegiatan di bidang siaga	100	
01.04	Persentase peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang siaga	100	
01.05	Persentase peningkatan pelaksanaan asistensi di bidang siaga	100	
01.06	Persentase peningkatan pengelolaan fasilitas siaga	100	
01.07	Persentase peningkatan penyusunan laporan di bidang siaga	100	
02	Meningkatnya pelaksanaan, asistensi dan evaluasi latihan SAR		15.467.733,0
02.01	Persentase penyusunan kebutuhan kegiatan di bidang latihan	100	
02.02	Persentase meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang latihan	100	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
02.03	Persentase meningkatnya pelaksanaan kegiatan di bidang latihan	100	
02.04	Persentase peningkatan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang latihan	100	
02.05	Persentase peningkatan pelaksanaan asistensi di bidang latihan	100	
02.06	Persentase peningkatan pengelolaan fasilitas latihan	100	
02.07	Persentase peningkatan penyusunan laporan pelaksanaan latihan	100	
03	Meningkatnya penyusunan standardisasi sistem prosedur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis siaga dan latihan SAR		1.270.480,0
03.01	Persentase penyusunan rencana pengembangan di bidang siaga dan latihan pencarian dan pertolongan untuk evaluasi kegiatan	100	
03.02	Persentase penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang siaga dan latihan pencarian dan pertolongan sebagai pedoman pelaksanaan siaga dan latihan	100	
Total			36.526.515,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan siaga SAR</i>										19.788.302,0
01.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							19.788.302,0
01.BKA.001	Siaga SAR								000 - Bukan Tematik		6.035.055,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								55.750,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								0,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								97.405,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								24.645,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								97.405,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	712 - Pelaksanaan Siaga SAR Kantor Pusat										3.517.990,0
		Pusat	Pusat								3.517.990,0
01.BKA.002	Fasilitas Siaga SAR								000 - Bukan Tematik		150.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								42.190,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								42.190,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								42.190,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								42.190,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								42.190,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								42.190,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								42.190,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								42.190,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								13.560,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								13.560,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								13.560,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								13.560,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								13.560,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								13.560,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								13.560,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								13.560,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								100.002,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								100.002,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								100.002,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								100.002,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								100.002,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								100.002,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.002,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								100.002,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								100.002,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								100.002,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								100.002,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								100.002,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								100.002,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								100.002,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								100.002,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								100.002,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								100.002,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								100.002,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								0,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								100.002,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								100.002,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								100.002,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								0,0
02.AEA.U02	Latihan SAR Beregu di Ketinggian								000 - Bukan Tematik		798.280,0
	712 - Pelaksanaan Latihan SAR Beregu di Ketinggian										798.280,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								37.878,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								37.878,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								37.878,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								37.878,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								37.878,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								37.878,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								37.878,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								37.878,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								37.878,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								0,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju								33.650,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								33.650,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate								33.650,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong								33.650,0
		Provinsi Papua	Kab. Merauke								33.650,0
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura								33.650,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								33.650,0
		Provinsi Papua	Kab. Mimika								33.650,0
02.AEA.U05	Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh								000 - Bukan Tematik		2.050.936,0
	715 - Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh										2.050.936,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								107.944,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								107.944,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								107.944,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								107.944,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								107.944,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								107.944,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								107.944,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								107.944,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								107.944,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								107.944,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								0,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								107.944,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								107.944,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								107.944,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								107.944,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								107.944,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								107.944,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								107.944,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								0,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								40.522,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								40.522,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								40.522,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								40.522,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								40.522,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								40.522,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang								40.522,0
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								40.522,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta								40.522,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya								0,0
		Provinsi Banten	Kab. Serang								40.522,0
		Provinsi Banten	Kota Tangerang								40.522,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								50.778,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								0,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								0,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								50.778,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								0,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								0,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								50.778,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya								50.778,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								50.778,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari								50.778,0
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli								46.247,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai								46.247,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang								46.247,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								46.247,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu								46.247,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung								46.247,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna								46.247,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara							1.270.480,0
03.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR								000 - Bukan Tematik		1.270.480,0
	711 - Penyusunan Rencana dan Pengembangan Kesiapsiagaan SAR										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0
	712 - Penyusunan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR										870.480,0
		Pusat	Pusat								870.480,0
Total											36.526.515,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan siaga SAR				19.788.302,0				95.858.718,0	96.730.548,0	96.730.548,0
01.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	9795	laporan		19.788.302,0				95.858.718,0	96.730.548,0	96.730.548,0
01.BKA.001	Siaga SAR	9568	laporan		6.035.055,0	235	235	235	86.233.718,0	86.805.548,0	86.805.548,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.BKA.001.711	Pelaksanaan Siaga SAR Kantor SAR	73,0	Laporan	34.480,3	2.517.065,0	222,0	222,0	222,0	73.250.188,0	73.672.018,0	73.672.018,0
01.BKA.001.712	Pelaksanaan Siaga SAR Kantor Pusat	9.495,0	Laporan	370,5	3.517.990,0	13,0	13,0	13,0	12.983.530,0	13.133.530,0	13.133.530,0
01.BKA.002	Fasilitas Siaga SAR	1	laporan		150.000,0	5	5	5	2.350.000,0	2.350.000,0	2.350.000,0
01.BKA.002.713	Pengelolaan Fasilitas Siaga SAR	1,0	Laporan	150.000,0	150.000,0	5,0	5,0	5,0	2.350.000,0	2.350.000,0	2.350.000,0
01.BKA.S01	Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR	43	laporan		6.177.681,0	43	43	43	7.275.000,0	7.575.000,0	7.575.000,0
01.BKA.S01.711	Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran Kantor SAR	43,0	Laporan	143.667,0	6.177.681,0	43,0	43,0	43,0	7.275.000,0	7.575.000,0	7.575.000,0
01.BKA.S02	Siaga SAR Khusus Lebaran Pos SAR	35	laporan		2.546.600,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BKA.S02.712	Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran Pos SAR	35,0	Laporan	72.760,0	2.546.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BKA.S03	Siaga SAR Khusus Lebaran Unit Siaga SAR	33	laporan		1.392.270,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BKA.S03.713	Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran Unit Siaga SAR	33,0	Laporan	42.190,0	1.392.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BKA.S04	Siaga SAR Khusus Nataru Kantor SAR	43	laporan		2.078.061,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BKA.S04.714	Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru Kantor SAR	43,0	Laporan	48.327,0	2.078.061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BKA.S05	Siaga SAR Khusus Nataru Pos SAR	39	laporan		961.155,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.BKA.S05.715	Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru Pos SAR	39,0	Laporan	24.645,0	961.155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BKA.S06	Siaga SAR Khusus Nataru Unit Siaga SAR	33	laporan		447.480,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BKA.S06.716	Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru Unit Siaga SAR	33,0	Laporan	13.560,0	447.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya pelaksanaan, asistensi dan evaluasi latihan SAR				15.467.733,0				22.354.000,0	23.004.000,0	23.004.000,0
02.AEA	Koordinasi	222	kegiatan		15.467.733,0				22.354.000,0	23.004.000,0	23.004.000,0
02.AEA.001	Latihan SAR	7	kegiatan		4.829.461,0	13	13	13	13.300.000,0	13.850.000,0	13.850.000,0
02.AEA.001.711	Pelaksanaan Latihan SAR Kantor Pusat	7,0	Kegiatan	689.923,0	4.829.461,0	13,0	13,0	13,0	13.300.000,0	13.850.000,0	13.850.000,0
02.AEA.002	Fasilitas Latihan SAR	2	kegiatan		150.000,0	4	4	4	1.750.000,0	1.750.000,0	1.750.000,0
02.AEA.002.712	Pengelolaan Fasilitas Latihan SAR	2,0	Kegiatan	75.000,0	150.000,0	4,0	4,0	4,0	1.750.000,0	1.750.000,0	1.750.000,0
02.AEA.U01	Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh	22	kegiatan		2.200.044,0	43	43	43	7.304.000,0	7.404.000,0	7.404.000,0
02.AEA.U01.711	Pelaksanaan Latihan SAR Beregu di Bangunan Runtuh	22,0	Kegiatan	100.002,0	2.200.044,0	43,0	43,0	43,0	7.304.000,0	7.404.000,0	7.404.000,0
02.AEA.U02	Latihan SAR Beregu di Ketinggian	28	kegiatan		798.280,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U02.712	Pelaksanaan Latihan SAR Beregu di Ketinggian	26,0	Kegiatan	30.703,1	798.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U03	Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan	31	kegiatan		833.316,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
02.AEA.U03.713	Pelaksanaan Latihan SAR Beregu di Gunung dan Hutan	22,0	Kegiatan	37.878,0	833.316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U04	Latihan SAR Beregu di Air	42	kegiatan		1.413.300,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U04.714	Pelaksanaan Latihan SAR Beregu di Air	41,0	Kegiatan	34.470,7	1.413.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U05	Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh	19	kegiatan		2.050.936,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U05.715	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh	19,0	Kegiatan	107.944,0	2.050.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U06	Latihan SAR Satuan di Ketinggian	27	kegiatan		1.094.094,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U06.716	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Ketinggian	40.548,0	Kegiatan	27,0	1.094.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U07	Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan	14	kegiatan		710.892,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U07.717	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan	14,0	Kegiatan	50.778,0	710.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U08	Latihan SAR Satuan di Air	30	kegiatan		1.387.410,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.U08.718	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Air	30,0	Kegiatan	46.247,0	1.387.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Meningkatnya penyusunan standardisasi sistem prosedur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis siaga dan latihan SAR				1.270.480,0				6.400.000,0	7.100.000,0	7.100.000,0
03.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK/Rancangan Standar/Pedoman/Standar		1.270.480,0				6.400.000,0	7.100.000,0	7.100.000,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.AEA.U05	Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh		2.050.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050.936,0
02.AEA.U05.715	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh	Utama	2.050.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050.936,0
02.AEA.U06	Latihan SAR Satuan di Ketinggian		1.094.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.094.094,0
02.AEA.U06.716	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Ketinggian	Utama	1.094.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.094.094,0
02.AEA.U07	Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan		710.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710.892,0
02.AEA.U07.717	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan	Utama	710.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710.892,0
02.AEA.U08	Latihan SAR Satuan di Air		1.387.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.387.410,0
02.AEA.U08.718	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Air	Utama	1.387.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.387.410,0
03	Meningkatnya penyusunan standardisasi sistem prosedur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis siaga dan latihan SAR		1.270.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.480,0
03.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.270.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.480,0
03.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR		1.270.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.480,0
03.AFA.001.711	Penyusunan Rencana dan Pengembangan Kesiapsiagaan SAR	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
03.AFA.001.712	Penyusunan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR	Utama	870.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870.480,0
Total			36.526.515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.526.515,0

Jakarta, 12 November 2021
SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.
NIP. 196201031991031001

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.AEA.U05	Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh		2.050.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050.936,0
02.AEA.U05.715	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh	Utama	2.050.936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050.936,0
02.AEA.U06	Latihan SAR Satuan di Ketinggian		1.094.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.094.094,0
02.AEA.U06.716	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Ketinggian	Utama	1.094.094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.094.094,0
02.AEA.U07	Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan		710.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710.892,0
02.AEA.U07.717	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan	Utama	710.892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710.892,0
02.AEA.U08	Latihan SAR Satuan di Air		1.387.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.387.410,0
02.AEA.U08.718	Pelaksanaan Latihan SAR Satuan di Air	Utama	1.387.410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.387.410,0
03	Meningkatnya penyusunan standardisasi sistem prosedur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis siaga dan latihan SAR		1.270.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.480,0
03.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.270.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.480,0
03.AFA.001	Perencanaan dan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR		1.270.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.480,0
03.AFA.001.711	Penyusunan Rencana dan Pengembangan Kesiapsiagaan SAR	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
03.AFA.001.712	Penyusunan Standardisasi Kesiapsiagaan SAR	Utama	870.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870.480,0
Total			36.526.515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.526.515,0

Jakarta, 12 November 2021

SEKRETARIS UTAMA

Drs. DIANTA BANGUN, M.Kes.

NIP. 196201031991031001

LEMBAR CATATAN HASIL PERTEMUAN TIGA PIHAK RENJA K/L

Kementerian/Lembaga : 107 - BADAN SAR NASIONAL

1. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

a. Tanggal Pelaksanaan : 05 Jun 2021

b. Waktu Pelaksanaan : 09:21

2. Tempat Pelaksanaan : Aplikasi Zoom (Tanggal 04 Juni 2021/Pukul 13.30 WIB s.d 17.00 WIB)

3. Pimpinan Rapat

Nama : Dail Umamil Asri

Jabatan : Koordinator Darat dan Perkeretaapian

4. Peserta Pertemuan

a. Kementerian PPN/Bappenas

1) Nama : Erni Nora M Siahaan

Jabatan : Perencana Pertama

Penugasan : Penelaah

2) Nama : Lucky M P

Jabatan : Staf

Penugasan : Bukan Penelaah

3) Nama : Handhi Setiawan Adiputra

Jabatan : Perencana Pertama

Penugasan : Penelaah

b. Kementerian Keuangan

1) Nama : Sunawan Agung Saksono

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah

Penugasan : Penelaah

2) Nama : Puja Listiyono

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah IV

Penugasan : Penelaah

3) Nama : Gatot Pitono

Jabatan : Staf

Penugasan : Penelaah

4) Nama : Riyanti Arimbi Simbolon

Jabatan : Analis Anggaran Ahli Muda

Penugasan : Penelaah

c. Kementerian/Lembaga

- 1) Nama : Moh. Barokna Haulah
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
Penugasan : Penelaah
- 2) Nama : Gusti Agung Wiryawinaka
Jabatan : Koordinator Substansi Rencana dan Program
Penugasan : Penelaah

1. Pembahasan Umum Kementerian/Lembaga

1. Program dan Anggaran

a. Catatan Kementerian/Lembaga

Kebutuhan Basarnas TA 2022 adalah sebesar Rp 5.182.550.788.000 sementara SEB Pagu Indikatif Basarnas TA 2022 adalah sebesar Rp 1.967.176.959.000 sehingga **terdapat kekurangan anggaran (*backlog*) sebesar Rp 3.215.373.829.000.**

Namun demikian sesuai Surat Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: 2404/PR.1.04/V/BSN-2021 tanggal 31 Mei 2021 Hal Permohonan Tambahan Anggaran TA 2022, Basarnas hanya mengajukan kegiatan yang dianggap prioritas sebesar Rp 1.725.488.205.000 mengingat kondisi Indonesia yang masih dalam pemulihan akibat pandemi Covid 19. Anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Balai Diklat Basarnas, sarana dan prasarana mendasar operasi SAR, sarana dan prasarana di Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan pemenuhan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Basarnas Tahun 2020-2024.

b. Catatan Kementerian PPN/Bappenas

1. Pagu indikatif Basarnas TA 2022 sebesar Rp 1,97 T, terdiri dari ops Rp 719,5 M dan non ops Rp 1,2 T.
2. Pagu tersebut mengalami penurunan +/- 13% dibanding anggaran basarnas TA 2021 yaitu sebesar Rp 2,27 T.
3. Pagu indikatif tersebut meliputi 17 proyek prioritas nasional untuk mendukung Kegiatan Prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi pada Program Prioritas Infrastruktur Dasar Prioritas Nasional 5, yaitu *Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*.
4. Diperlukan pendetailan sandingan target carry over dan target baru TA.2022 yang diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
5. Perlu memastikan kegiatan yang tertunda akibat re-focusing APBN TA.2021 telah diakomodasi dalam TA.2022.

c. Catatan Kementerian Keuangan

1. SEB Pagu Indikatif Basarnas TA 2022 adalah sebesar Rp 1.967.176.595.000,- sudah sesuai dengan SBPI TA 2022, yang terdiri dari Belanja Operasional Belanja Pegawai (komponen 001) Sebesar Rp502.724.167.000,- Belanja Operasional Barang (002) sebesar Rp216.780.280.000,- dan Belanja Non Operasional sebesar Rp1.247.672.512.000,-
2. Penurunan Pagu Basarnas tersebut disebabkan oleh adanya upaya penanggulangan pandemi covid 19 yang tetap harus diprioritaskan sehingga alokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial , dukungan KUKM, insentif dunia usaha, dukungan sektoral dan Pemda masih memerlukan alokasi anggaran yang cukup tinggi agar pertumbuhan perekonomian stabilitas masyarakat tetap terjaga.
3. Diminta kepada Basarnas untuk mengoptimalkan alokasi yang sudah ditetapkan dalam SBPI Tahun 202n2 untuk mendanai kegiatan operasional maupun non operasional Basarnas..

d. Kesepakatan

Menyepakati pagu BASARNAS sesuai dengan pagu indikatif

e. Tindak Lanjut

Memerlukan penajaman dan optimalisasi untuk mendukung prioritas

2. Restrukturisasi Program

a. Catatan Kementerian/Lembaga

Sesuai Surat Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI Nomor: 05920/PP.04.03/Dt.8.2/B/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 Hal penyampaian update terkait penyusunan Rancangan Rencana Kerja K/L TA 2022 dan Pertemuan Tiga Pihak. Perubahan tersebut antara lain:

- Terdapat 4 (empat) KRO baru yang menggantikan seluruh KRO pada Group KRO E (Administrasi Pemerintahan Internal K/L) dan terdapat RO Generik yang distandarisasi sebagai turunan dari 4 KRO yang baru ditetapkan.
- Fitur pencatatan dan penandatanganan Catatan Hasil Pertemuan Tiga Pihak secara online telah dapat dilakukan pada Sistem Informasi KRISNA-RENJA KL.

Sebagai tindak lanjut restrukturisasi program tersebut, Basarnas akan menggunakan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dengan berpedoman pada Daftar KRO dan RO yang telah disusun oleh Kementerian Keuangan. KRO yang akan digunakan oleh Basarnas antara lain:

- a. Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (Kode KRO BHC dan QHC)
- b. Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (Kode KRO CAP dan RAP)
- c. Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (Kode KRO RBH)
- d. OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (Kode KRO RCM)
- e. OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (Kode KRO RDH)
- f. Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (Kode KRO DCK)

b. Catatan Kementerian PPN/Bappenas

Basarnas sebaiknya melakukan penyesuaian KRO dan RO untuk kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan referensi yang sudah tersedia di aplikasi KRISNA dan segera diproses inputing aplikasinya

c. Catatan Kementerian Keuangan

Kemenkeu memberikan catatan:

1. Sependapat dengan yang akan ditempuh/dilakukan Basarnas, untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan Basarnas sesuai dengan KRO yang sudah ditetapkan dalam referensi aplikasi Krisna. Agar segera diusulkan kepada Bappenas dan diproses pada aplikasi Krisna.
2. Basarnas agar senantiasa mengevaluasi penggunaan KRO / RO yang sudah digunakan, dan melakukan perbaikan jika terdapat penggunaan KRO / RO yang masih kurang tepat di TA 2021 untuk disempurnakan di TA 2022.
3. KRO merupakan kumpulan dari RO yang sejenis/serumpun sehingga dengan pemakaian KRO tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Basarnas serta RO yang digunakan benar=benar dapat mencerminkan output riil dan end product

d. Kesepakatan

Melakukan penyesuaian dan perbaikan KRO dan RO agar sesuai dengan jenis dan ruang lingkup kegiatan serta dapat mencerminkan kinerja output dari kegiatan tersebut

e. Tindak Lanjut

Penyesuaian dapat dilakukan oleh Basarnas pada aplikasi KRISNA

3. Catatan Lainnya

a. Catatan Kementerian/Lembaga

Tugas dan fungsi Basarnas selain untuk mendukung Keamanan dan Keselamatan Transportasi juga mendukung Program Pemerintah lainnya antara lain:

- Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia;
- Penguatan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Peningkatan ketahanan bencana terutama pada tahap tanggap darurat dalam hal pencarian dan evakuasi korban;
- Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT);
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

b. Catatan Kementerian PPN/Bappenas

1. Untuk mewujudkan peningkatan ketahanan bencana, pelaksanaan kegiatan - kegiatan BASARNAS tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pemulihan ekonomi, yang diprioritaskan pada sektor pariwisata, industri dan investasi.
2. Mekanisme pengisian PN masih sama dengan pengisian Renja TA.2021
3. Pengisian Catatan TM dilakukan secara Online

c. Catatan Kementerian Keuangan

Kemenkeu memberikan catatan:

Basarnas agar mempersiapkan sejak dini untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan data dukung dari pihak eksternal, yaitu a.l.

1. Pengadaan barang yg akan diserahkan kepada Masyarakat, Pemda, dan BUMN agar dilengkapi dokumen persetujuan dari Calon Penerima Barang, untuk menghindari BPYBDS
2. Melengkapi RKBMN di DJKN Kemenkeu.
3. Surat Persetujuan dari Presiden untuk pembangunan gedung kantor baru,
4. Dalam rangka mendukung Digitalisasi Nasional, kegiatan/proyek berupa: (i) pembangunan/pengadaan system IT baru atau aplikasi baru yg bersifat umum, dan (ii) pengadaan server baru dan/atau Data Center baru, harus mendapat clearance dari Kominfo. Serta untuk SPBE ada clearance dari Menpan RB.
5. Program/Kegiatan riset, agar mengacu pada Perpes 38/2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional.
6. Berdasarkan Perpres 60/2020 ttg Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, keg/proyek yg berpengaruh thd penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur hrs mendapat evaluasi, pendapat atau rekomendasi dari Tim Koordinasi penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur atau Kemen ATR/BPN.

d. Kesepakatan

e. Tindak Lanjut

4. Kebutuhan Mendesak

a. Catatan Kementerian/Lembaga

A. Pagu Indikatif yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar **Rp 1.967.176.959.000**, tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pada TA 2022. Anggaran yang dibutuhkan Basarnas pada TA 2022 adalah sebesar **Rp 5.182.550.788.000** dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp 1.351.219.502.000** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasional Pegawai (Komponen 001) sebesar **Rp 560.170.153.000**;
- b. Belanja Operasional Barang (Komponen 002) sebesar **Rp 216.780.280.000**;
- c. Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit (Komponen 005) sebesar **Rp 17.450.000.000**; dan
- d. Belanja Non Operasional sebesar **Rp 556.819.069.000**

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana adalah sebesar **Rp 3.831.331.286.000** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit sebesar **Rp 523.450.000.000**; dan

b. Belanja Non Operasional sebesar **Rp 3.307.881.286.000**.

B. Untuk Belanja Operasional Pegawai (Komponen 001) dibutuhkan anggaran sebesar **Rp 560.170.153.000** yang terdiri dari:

1. Gaji dan tunjangan untuk existing pegawai adalah sebesar **Rp 476.729.805.000**;
2. Penambahan gaji dan tunjangan untuk perkiraan pegawai baru (350 orang) adalah sebesar **Rp 24.858.106.000**; dan
3. Biaya lembur Pegawai ASN sebesar **Rp 58.582.242.000**

Apabila dibandingkan dengan Pagu Indikatif, akan terdapat potensi kekurangan anggaran sebesar Rp 560.170.153.000 - Rp 502.724.167.000 = **Rp 57.445.986.000**

C. Untuk Belanja Operasional Barang (Komponen 002) dibutuhkan anggaran sebesar **Rp 216.780.280.000** yang terdiri dari:

1. Operasional Perkantoran sebesar **Rp 24.285.590.000**;
2. Pemeliharaan Prasarana Kantor sebesar **Rp 47.591.569.000**;
3. Pemeliharaan Sarana Kantor sebesar **Rp 14.268.432.000**;
4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional adalah sebesar **Rp 9.154.731.000**;
5. Sewa Gedung, Kendaraan Operasional dan Sarana Kantor sebesar **Rp 4.464.840.000**;
6. Langganan Daya dan Jasa sebesar **Rp 38.120.337.000**; dan
7. Keamanan dan Kebersihan sebesar **Rp 78.894.781.000**.

D. Untuk Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit (Komponen 005) dibutuhkan anggaran sebesar **Rp 540.900.000.000** yang terdiri dari:

1. Pemeliharaan Peralatan SAR sebesar **Rp 14.480.000.000**;
2. Pemeliharaan Sarana Darat sebesar **Rp 38.156.000.000**;
3. Pemeliharaan Sarana Laut sebesar **Rp 311.571.169.000**;
4. Pemeliharaan Sarana Udara sebesar **Rp 95.525.000.000**;
5. Pemeliharaan Prasarana SAR sebesar **Rp 4.275.390.000**; dan
6. Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR sebesar **Rp 59.480.000.000**; dan
7. Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi sebesar **Rp 17.450.000.000**.

E. Untuk Belanja Barang Non Operasional dibutuhkan anggaran sebesar **Rp 3.864.700.355.000** yang terdiri dari:

1. Kegiatan Prioritas Nasional sebesar **Rp 2.112.375.282.000**;
2. Belanja Barang Non Operasional Program I adalah sebesar **Rp 556.819.069.000**; dan
3. Belanja Barang Non Operasional Program II adalah sebesar **Rp 1.196.506.004.000**.

Apabila dibandingkan dengan Pagu Indikatif, akan terdapat potensi kekurangan anggaran sebesar Rp 3.864.700.355.000 - Rp 1.190.266.526.000 = **Rp 2.674.473.829.000**.

F. Disepakati perubahan komposisi Pagu Indikatif Basarnas TA 2022 menjadi:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 907.506.875.000; dan
2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana sebesar Rp 1.059.670.084.000.

Pagu tersebut termasuk:

1. Belanja Operasional Pegawai (Komponen 001) sebesar Rp 531.623.370.000;
2. Belanja Operasional Barang (Komponen 002) sebesar Rp 216.780.280.000; dan
3. Belanja Dukungan Tugas dan Fungsi (Komponen 005) sebesar Rp 540.900.000.000.

b. Catatan Kementerian PPN/Bappenas

1. Basarnas perlu meninjau kembali perhitungan kebutuhan terkait program Dukungan Manajemen tersebut agar Prioritas Nasional tetap dapat tercapai.
2. Selain itu perlu juga dilakukan prioritisasi dari tambahan pagu yang diusulkan.

c. Catatan Kementerian Keuangan

Kemenkeu memberikan catatan:

1. Basarnas agar dapat mengalokasikan dan mengoptimalkan pagu yang sudah ditetapkan dalam SBPI TA 2022, dengan melakukan penajaman-penajaman, agar kiranya kegiatan-kegiatan mendesak tersebut dapat memperoleh pendanaan untuk dilaksanakan.
2. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa kiranya pemenuhan kegiatan-kegiatan mendesak, seperti Kegiatan Prioritas Nasional (PN) maupun kegiatan Major Project pada Basarnas, agar benar-benar kemanfaatannya (outcome) dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan transportasi darat, pelaku industri transportasi dan pelaku industri konstruksi, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dimasa pandemic covid-19 ini.
3. Jika terdapat kebutuhan tambahan anggaran, agar diusulkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas dan diusulkan sebagai catatan tiga pihak sehingga dapat diinventaris sebagai bahan masukan perubahan pagu indikatif ke pagu anggaran.

d. Kesepakatan

e. Tindak Lanjut

Perlu dilakukan peninjauan ulang atas perhitungan kebutuhan dukungan manajemen yang ada serta prioritisasi dari tambahan pagu yang diusulkan.

2. Program: BM - Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

1. Prioritas Nasional

a. Catatan Kementerian/Lembaga

A. Sesuai Lampiran III.b SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-361/MK.02/2021 dan Nomor: B.238/M.PPN/D.8/ PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 Hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Basarnas adalah sebesar **Rp 998.980.000.000** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR

a) Penyediaan **6 unit Rescue Boat Kelas 2;**

- b) Penyediaan **6 unit Rigid Inflatable Boat Kelas 1**;
 - c) Penyediaan **5 unit Rigid Inflatable Boat Kelas 2**;
 - d) Penyediaan **20 unit Landing Craft**;
 - e) Penyediaan **10 unit Rescue Car Tipe I**;
 - f) Penyediaan **17 unit Rescue Car Tipe II**;
 - g) Penyediaan **5 unit Rescue Truck Tipe I**; dan
 - h) Penyediaan **12 unit Rescue Truck Tipe II**;
 - i) Pengadaan **1 paket Peralatan SAR**;
 - j) Pemeliharaan Sarana SAR
 - k) Pemeliharaan Prasarana SAR
2. Pengelolaan Operasi SAR berupa Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR sebanyak **44 satker**;
 3. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR berupa Penyediaan **4 paket Sistem Komunikasi** dan pemeliharaan peralatan sistem komunikasi;
 4. Pembinaan Potensi SAR berupa Pelatihan Potensi SAR sebanyak **5.000 orang**; dan
 5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi berupa pemeliharaan peralatan teknologi informasi

B. Basarnas mengusulkan agar target Kegiatan Prioritas Nasional disesuaikan, mengingat terbatasnya anggaran pada TA 2022 sehingga tidak mengganggu penyediaan anggaran untuk kegiatan lainnya. Usulan tersebut adalah sebesar **Rp 879.975.000.000** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
 - a) Penyediaan **6 unit Rescue Boat Kelas 2** dilakukan secara Multi Years Contract (MYC);
 - b) Penyediaan **6 unit Rigid Inflatable Boat Kelas 1**;
 - c) Penyediaan **20 unit Landing Craft**;
 - d) Penyediaan **14 unit Rescue Car Tipe II**;
 - e) Pengadaan **1 paket Peralatan SAR**;
 - f) Pemeliharaan Sarana SAR
 - g) Pemeliharaan Prasarana SAR
2. Pengelolaan Operasi SAR berupa Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR sebanyak **44 satker**;
3. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR berupa Penyediaan **4 paket Sistem Komunikasi** dan pemeliharaan peralatan sistem komunikasi;
4. Pembinaan Potensi SAR berupa Pelatihan Potensi SAR sebanyak **5.000 orang**; dan
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi berupa pemeliharaan peralatan teknologi informasi

C. Disepakati alokasi kegiatan Prioritas Nasional adalah sebesar **Rp 909.225.000.000** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR

a) Penyediaan **6 unit Rescue Boat Kelas 2** dilakukan secara Multi Years Contract (MYC);

b) Penyediaan **6 unit Rigid Inflatable Boat Kelas 1**;

c) Penyediaan **4 unit Rigid Inflatable Boat Kelas 2**;

d) Penyediaan **20 unit Landing Craft**;

e) Penyediaan **5 unit Rescue Car Tipe I**;

f) Penyediaan **14 unit Rescue Car Tipe II**;

g) Pengadaan **1 paket Peralatan SAR**;

h) Pemeliharaan Sarana SAR

i) Pemeliharaan Prasarana SAR

2. Pengelolaan Operasi SAR berupa Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR sebanyak **44 satker**;

3. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR berupa Penyediaan **4 paket Sistem Komunikasi** dan pemeliharaan peralatan sistem komunikasi;

4. Pembinaan Potensi SAR berupa Pelatihan Potensi SAR sebanyak **5.000 orang**; dan

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi berupa pemeliharaan peralatan teknologi informasi

b. Catatan Kementerian PPN/Bappenas

1. Kegiatan Prioritas Nasional Basarnas pada SEB Pagu Indikatif TA.2022 sudah ditetapkan sebesar Rp.998,98 M dengan detail kegiatan sesuai lampiran tersebut.

2. Terdapat 4 (empat) proyek Prioritas Nasional yang didrop targetnya oleh Basarnas, yaitu:

i. Sarana SAR Rigid Inflatable Boat Kelas 2 (Prioritas Nasional)

ii. Sarana SAR Rescue Car Tipe I (Prioritas Nasional)

iii. Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional)

iv. Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional)

3. Untuk penajaman kegiatan Prioritas Nasional dapat disesuaikan dengan ketersediaan Pagu Indikatif yang sudah disampaikan agar seluruh proyek prioritas tersebut dapat tetap berjalan.

c. Catatan Kementerian Keuangan

Kemenkeu memberikan catatan:

1. Kegiatan-kegiatan Prioritas Nasional Basarnas dengan total anggaran sebesar **Rp879.975.000.000,00** kiranya sudah mengakomodir dan sejalan dengan Lampiran 3B SBPI (Basarnas) TA 2022. Jika ada perubahan terkait dengan capaian volume kegiatan PN Basarnas harus disampaikan dan mendapat persetujuan Bappenas.
2. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penugasan tersebut, sehingga sudah mengambil (mengkapling) space anggaran Basarnas, disarankan agar Basarna harus membuat urutan prioritas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tusi secara efisien, rasional dan hemat dan sebisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan belanja birokratif pada TA 2022.

d. Kesepakatan

Melakukan penajaman terhadap kegiatan prioritas dan target target yang menjadi kegiatan PN dan sedapat mungkin alokasi PN tidak berkurang secara signifikan

e. Tindak Lanjut

- 1. Diperlukan pendetailan sandingan target *carry over* dan target baru TA.2022 yang diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
- 2. Memastikan kegiatan yang tertunda akibat re-focusing APBN TA.2021 telah diakomodasi dalam TA.2022.
- 3. Untuk penajaman kegiatan Prioritas Nasional dapat disesuaikan dengan ketersediaan Pagu Indikatif yang sudah disampaikan agar seluruh proyek prioritas tersebut dapat tetap berjalan

Catatan

Pihak-pihak yang bersepakat:

Direktorat Transportasi
Kementerian PPN/Bappenas



Ikhwan Hakim
(Direktur Transportasi)

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Kementerian Keuangan



Made Arya Wijaya
(Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman)

Biro Perencanaan
BADAN SAR NASIONAL



Moh. Barokna Haulah
(Kepala Biro Perencanaan)

Keterangan:

- 1. Pokok Bahasan : Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Lokasi dan struktur di bawahnya termasuk sasaran dan indikatornya
- 2. Catatan : Catatan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan/atau kementerian/lembaga
- 3. Tindak Lanjut : Tindak lanjut untuk diakomodasi dalam perbaikan Rancangan Renja K/L, baik berupa tindak lanjut untuk disepakati (diakomodasi), diakomodasi dengan perubahan/persyaratan/catatan tertentu, atau belum dapat diakomodasi di dokumen Renja K/L
- 4. Catatan ditandatangani oleh pejabat eselon II (Kepala biro perencanaan/unit kerja/satuan kerja kementerian/lembaga, Direktur di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan).
- 5. Apabila catatan tidak dapat diakomodasi dalam format tersebut, maka dapat dijabarkan dalam format lain (misalnya: diagram, gambar, dan sebagainya).



LAMPIRAN A - ALOKASI ANGGARAN
RINCIAN PAGU PER PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2022
(RIBU RUPIAH)

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 107
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

RINCIAN PAGU ANTAR PROGRAM:

KODE	NAMA PROGRAM/SUMBER PENDANAAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2022		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
107.01.BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	0,0	1.059.670.084,0	1.059.670.084,0
	1. Rupiah	0,0	1.059.670.084,0	1.059.670.084,0
	2. PNBP	0,0	0,0	0,0
	3. BLU	0,0	0,0	0,0
	4. PLN	0,0	0,0	0,0
	5. Rupiah Murni Pendamping (RMP)	0,0	0,0	0,0
	6. PDN	0,0	0,0	0,0
	7. Hibah	0,0	0,0	0,0
	8. Pendamping Hibah	0,0	0,0	0,0
	9. SBSN	0,0	0,0	0,0
	10. Hibah dalam Negeri	0,0	0,0	0,0
107.01.WA	Program Dukungan Manajemen	748.403.653,0	159.103.222,0	907.506.875,0
	1. Rupiah	748.403.653,0	159.103.222,0	907.506.875,0
	2. PNBP	0,0	0,0	0,0
	3. BLU	0,0	0,0	0,0

KODE	NAMA PROGRAM/SUMBER PENDANAAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2022		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
	4. PLN	0,0	0,0	0,0
	5. Rupiah Murni Pendamping (RMP)	0,0	0,0	0,0
	6. PDN	0,0	0,0	0,0
	7. Hibah	0,0	0,0	0,0
	8. Pendamping Hibah	0,0	0,0	0,0
	9. SBSN	0,0	0,0	0,0
	10. Hibah dalam Negeri	0,0	0,0	0,0
	1. Rupiah	748.403.653,0	1.218.773.306,0	1.967.176.959,0
	2. PNBP	0,0	0,0	0,0
	3. BLU	0,0	0,0	0,0
	4. PLN	0,0	0,0	0,0
	5. Rupiah Murni Pendamping (RMP)	0,0	0,0	0,0
	6. PDN	0,0	0,0	0,0
	7. Hibah	0,0	0,0	0,0
	8. Pendamping Hibah	0,0	0,0	0,0
	9. SBSN	0,0	0,0	0,0
	10. Hibah dalam Negeri	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	748.403.653,0	1.218.773.306,0	1.967.176.959,0

ALOKASI (*) TERMASUK:	
1. Belanja Operasional Pegawai (komponen 001)	Rp. 531.623.373,0
2. Belanja Operasional Barang (komponen 002)	Rp. 216.780.280,0
3. Belanja Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (komponen 003)	Rp. 0,0
4. Belanja Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (komponen 004)	Rp. 0,0
5. Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit (komponen 005)	Rp. 540.900.000,0



LAMPIRAN B - ALOKASI ANGGARAN
RINCIAN PRIORITAS NASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2022
(RIBU RUPIAH)

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 107
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

RINCIAN PAGU PRIORITAS NASIONAL:

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU	LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.WA	<i>Program Dukungan Manajemen</i>			17.450.000,0						
107.3945	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi			17.450.000,0						
107.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	Unit	0,0						
107.001	Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	0	Unit	0,0	Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.RCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	49	Unit	17.450.000,0						

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU	LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.001	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	49	Unit	17.450.000,0	Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.BM	<i>Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana</i>			845.057.857,0						
107.3946	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR			677.642.857,0						
107.RAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	81	Unit	211.739.504,0						

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU		LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.001	Sarana SAR Pesawat Fixed Wing (Prioritas Nasional)	0	Unit	0,0		Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.002	Sarana SAR Medium Helikopter (Prioritas Nasional)	0	Unit	0,0		Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.003	Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 1 (Prioritas Nasional)	0	Unit	0,0		Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.004	Sarana SAR Multipurpose Rescue Vessel Tipe 2 (Prioritas Nasional)	0	Unit	0,0		Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU	LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.RBH	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	4	unit	1.993.353,0						
107.001	Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	4	unit	1.993.353,0	Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.RCM	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	2389	Unit	459.419.610,0						

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU	LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.001	Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	2389	Unit	459.419.610,0	Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.RDH	OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	111	unit	4.490.390,0						

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU	LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.001	Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	111	unit	4.490.390,0	Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.3948	Pengelolaan Operasi SAR			60.000.000,0						
107.QHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	44	operasi	60.000.000,0						

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU	LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.001	Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	43	operasi	45.000.000,0	Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.002	Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	1	operasi	15.000.000,0	Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.3949	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR			79.540.000,0						
107.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	Unit	20.000.000,0						

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU	LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.001	Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	4	Unit	20.000.000,0	Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.RCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	272	Unit	59.540.000,0						
107.001	Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	272	Unit	59.540.000,0	Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Pusat		01- Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.3971	Pembinaan Potensi SAR			27.875.000,0						
107.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5000	Orang	27.875.000,0						

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	PAGU	LOKASI	MAJOR PROJECT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL
107.U03	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan (Prioritas Nasional)	750	Orang	4.181.250,0	Provinsi Aceh, Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara		02- Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
107.U04	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder (Prioritas Nasional)	1200	Orang	6.690.000,0	Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Pusat		02- Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan	04- Keselamatan dan Keamanan Transportasi	01- Infrastruktur Pelayanan Dasar	05- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Total				862.507.857,0						



Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3, Kemayoran
Jakarta Pusat 10720
www.basarnas.go.id